

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
DI DESA LOMPOLOANG KECAMATAN PITUMPANUA
KABUPATEN WAJO**

Disusun dan diusulkan oleh

KASMING

Nomor Stambuk: 10561 05022 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI DESA LOMPOLOANG KECAMATAN
PITUMPANUA KABUPATEN WAJO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

KASMING

Nomor Stambuk : 10561 05022 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

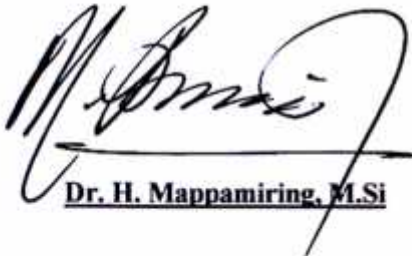
2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani
Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua
Kabupaten Wajo
Nama Mahasiswa : Kasming
Nomor Stambuk : 105610502214
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

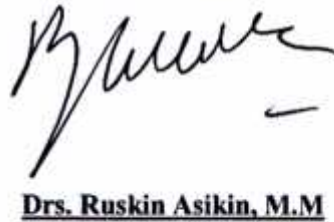
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II



Drs. Ruskin Asikin, M.M

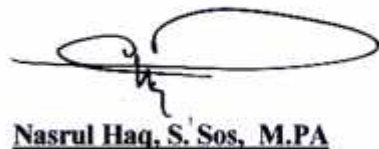
Mengetahui :

Dekan
Fisip Unismuh Makassar



Dr. Hj. Jhyani Malik, S.Sos M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



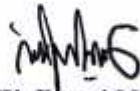
Nasrul Haq, S. Sos, M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0005/FSP/A3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2019.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

Penguji

1. Dr. H. Jaelan Usman, M.Si (ketua)
2. Dra. Djuliaty Saleh, M.Si
3. Drs. Ruskin Azikin, M.M
4. Haerana, S.Sos., M.Pd



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Kasming

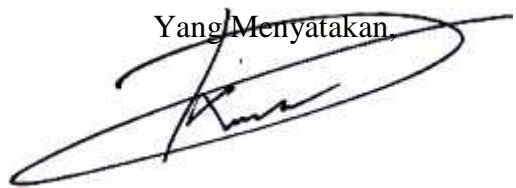
Nomor Stambuk : 105610502214

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, , 2018

Yang Menyatakan.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kasming', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Kasming

ABSTRAK

Kasming. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (dibimbing oleh Mappamiring dan Ruskin Asikin).

Peran pemerintah merupakan keperluan mutlak dalam suatu organisasi baik swasta ataupun organisasi pemerintah dan menjadi salah satu fungsi utamanya yang harus dilakukan oleh pucuk pimpinan yang menjadi pemimpin organisasi. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menjelaskan Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah sebagai *regulator* dalam pemberdayaan kelompok tani, peran pemerintah sebagai *dinamisator* dalam pemberdayaan kelompok tani, dan mengetahui peran pemerintah sebagai *fasilitator* dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lompoloang Kabupaten Wajo. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data menggunakan model analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini dilihat dari aspek pemerintah sebagai *regulator* (1) aturan/mekanisme, (2) kebijakan pemerintah belum sepenuhnya baik. Pemerintah sebagai *dinamisator* yakni (1) Sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan, dan (4) kunjungan Lapangan. Dan Pemerintah sebagai *fasilitator* sebagai penyedia bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi telah mampu memfasilitasi masyarakat petani cukup baik.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pemberdayaan Kelompok Tani

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan kelompok Tani Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, ayahanda Aliming dan ibunda Hj. Nurlela atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita. Ucapan terima kasih kepada saudara saya Kasmiati beserta segenap keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil demi kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, Dr. H. Mappamrirng. M.Si, selaku pembimbing I dan ayahanda Drs. Ruskin Azikin, M.M selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan

memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga tak lupa haturkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibunda Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik
4. Kakanda Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Sekretaris jurusan Ilmu administrasi Negara berkat motivasi yang diberikan penulis merasakan semangat yang luar biasa dalam melewati masa pahit dan masa sulit di akhir kuliah.
5. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Soppeng yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepada seluruh saudara se-perkumpulan saya PJK'S Squad yang telah menemani, menyemangati, serta memberikan dukungan dan dorongan kepada

saya selama ini, Fajrin Mahmud, Irsan Aqsa, Rahman Iskandar, Riswandi, Hamdan, Alam, Randy, Ancha, Erwinsyah, Rahmat, M. Icsan, Ammar,

8. Kepada Nurfadillah yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat untuk terus bekerja keras demi terlaksananya skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar sospol Universitas Muhammadiyah Makassar terutama kepada satu angkatan 2014 Ilmu Administrasi Negara terkhusus kelas Ilmu Administrasi Negara E.
10. Kakanda, adinda, dan teman-teman pengurus Besar Bem Sospol, IMM Sospol, dan Humaniera yang telah memberikan ruang untuk berproses didalamnya.
11. Kakanda, adinda dan teman-teman pengurus serta HIPMI PT KAMPUS BIRU Makassar yang selama ini telah memberikan dorongan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudara A. Fikram Aditama Wildan yang senantiasa memberikan bimbingan dan pengetahuannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
13. Teman-teman KKP Ang. XV Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unisversitas Muhammadiyah Makassar Khususnya posko Desa Massamaturu Fahmi, Samsinar, Incy, Ira, Winda, Ida yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
14. Letting-lettingku di AFILIASI yang selalu kompak dan solid, yang selama ini `memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Pihak Dinas pertanian Kabupaten Wajo beserta pemerintah Desa Lompoloang yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian.

16. Teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih karena selalu mendukung dan memberi motivasi dalam proses penyelesaian skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Diakhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan, disadari maupun tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, , 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kasming', enclosed within a large, loopy oval stroke.

Kasming

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan skripsi	i
Halaman persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran Pemerintah	11
B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	13
C. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani	22
D. Kerangka Fikir.....	27
E. Fokus Penelitian	29
F. Deskripsi Fokus Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Tehnik Analisi Data	34
G. Pengabsahan Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Obyek Penelitian	37
1. Letak Geografis Desa Lompoloang	37
2. Kondisi Geografis Desa Lompoloang	38
3. Visi dan Misi Desa Lompoloang.....	39
4. Struktur Pengurus Desa Lompoloang	40
5. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa	41
B. Peran Pemerintah Sebagai regulator dalam Pemberdayaan Kelompok Tani.....	42

1. Aturan/mekanisme dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	42
C. Peran Pemerintah Sebagai dinamisator dalam Pemberdayaan	
Kelompok Tani.....	47
1. Sosialisasi.....	48
2. Pendampingan	52
3. Pelatihan	57
4. Kunjungan lapangan.....	62
D. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan	
Kelompok Tani.....	69
1. Penyedia bibit unggul, pupuk dan sarana produksi lainnya.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

A. Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	30
B. Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Kab. Wajo	34
C. Tabel 4.2 Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Lompoloang Kabupaten Wajo Tahun 2018	51
D. Tabel 4.3 Jadwal Pendampingan Kelompok Tani Desa Lompoloang Kabupaten Wajo Tahun 2018	56
E. Tabel 4.4 Pelaksanaan Pelatihan PPL Desa Lompoloang Kabupaten Wajo Tahun 2018.....	61
Tabel 4.5 Jadwal Kunjungan Lapangan PPL Desa Lompoloang Kabupaten Wajo Tahun 2018.....	65
F. Tabel 4.6 Bantuan Sarana dan Prasarana Anggota Kelompok Tani Desa Lompoloang Tahun 2018.....	73

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 4.1 Struktur Pengurus Desa Lompoloang	37
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai pelaksana utama dalam Negara mempunyai peran yang sangat penting demi berlangsungnya proses pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pembangunan lainnya. Sebagaimana pemerintah dituntut untuk mampu menjadi penyelenggara Negara dalam mewujudkan perkembangan, kemajuan serta mampu menjadi faktor pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk melihat tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat dilihat dari tingkat pelayanan, pemerintah kepada masyarakat itu sendiri.

Peran pemerintah tidak terlepas dari bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan daya saing masyarakat. Melihat yang terjadi pada saat ini bahwa masyarakat di era modern dengan begitu pesat dan berkembangnya ilmu teknologi dan komunikasi sehingga dapat mengindikasikan untuk semua masyarakat harus mampu mempersiapkan dirinya untuk terus mengembangkan potensinya yang kemudian tidak hanya bersumber dari kalangan masyarakat sekitarnya saja akan tetapi juga menjadi tugas pokok bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk terus berperan aktif dalam mengawal, dan mendampingi masyarakat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah sehingga mampu mengambil bagian yang strategis demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi harus menjadi tolak ukur utama bagi pemerintah agar semua elemen masyarakat mampu menerima serta menerjemahkan segala bentuk keputusan pemerintah, sehingga dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut maka pemerintah akan lebih mampu menyelenggarakan roda pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Masyarakat menjadi objek utama dalam keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya bahwa berhasil tidaknya pemerintah dilihat dari peningkatan atau penurunan tingkat kehidupan masyarakat. Pemerintah juga harus mampu berperan penting untuk mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengembangan masyarakat sehingga dengan ikut sertanya seluruh elemen masyarakat maka pemerintah akan lebih mudah untuk memahami hal-hal yang terdapat di masyarakat.

Telah diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya pada Bab III mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya bahwa dalam hal pengembangan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat maka pemerintah harus mampu menerapkan serta melaksanakan kegiatan melalui apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, dan pelatihan. Dengan demikian seharusnya pemerintah melakukan pembinaan kelembagaan kelompok petani secara berkesinambungan dan berorientasi pada pola pengembangan

masyarakat, yang kemudian diarahkan kepada pola pikir petani dalam menerapkan sistem pertanian baik pada kelompok pertanian mikro maupun makro, sehingga dengan adanya pembinaan dari pemerintah yang diharapkan mampu berperan aktif terhadap kelompok petani sehingga dapat memaksimalkan program pemerintah dalam pengembangan serta kemajuan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Diperkuat oleh aturan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa telah Tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa untuk menjadikan masyarakat yang berdaulat serta terciptanya kemandirian khususnya di bidang pertanian sehingga petani lebih maju dan mandiri dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik maka sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil peran dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa bagian dalam perlindungan dan pemberdayaan petani seperti, perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, sampai pada bagian dimana petani mengambil peran serta dalam pemberdayaan tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada bab XII tentang lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa bahwa lembaga kemasyarakatan desa yang ada untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan serta pemberdayaan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah mengenai pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani pada Bab V pasal 37 mengenai pendidikan dan pelatihan bahwa pemerintah daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dibidang pertanian, sementara pada bagian ketiga pasal 39 mengenai penyuluhan dan pendampingan poin 3 mengemukakan bahwa penyuluhan dan pendampingan meliputi tata cara budidaya, pengolahan, pemasaran, analysis kelayakan usaha, kemitraan, serta akses permodalan, serta pada bagian keempat mengatur mengenai pengembangan sistem serta sarana dan pemasaran hasil pertanian bahwa pemerintah daerah selaku pelaksana tugas pemberdayaan kepada petani harus mampu melakukan pemberdayaan melalui pengembangan sistem dan sarana prasarana pemasaran meliputi, penyediaan pasar, mewujudkan fasilitas pertanian, serta pengembangan pola kemitraan petani.

Peran pemerintah sebagai dinamisator juga menjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan yang terjadi di Desa Lompoloang Kabupaten Wajo, realita yang terjadi bahwa pemerintah kurang aktif terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan berbagai macam pemahaman, serta pemerintah masih tidak secara aktif dalam mendampingi masyarakat petani seperti memberikan bimbingan secara langsung dalam mengelola pertanian maupun pelatihan kepada masyarakat. Kurangnya keterlibatan pemerintah untuk turun ke lapangan melihat kondisi yang terjadi di lapangan juga menjadi faktor utama yang menjadi masalah bagi masyarakat karena pemerintah tidak mampu mengetahui hal-hal mendasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, yang kemudian masyarakat menjadi

kurang aktif menjalin komunikasi keperintah dan menjadikan keterbatasan untuk melakukan pengembangan demi tercapainya kesejahteraan di masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dilakukan pemerintah merupakan kegiatan pemerintah yang sepantasnya berjalan secara berkesinambungan serta berorientasi pada perkembangan dan kesejahteraan masyarakat yang kemudian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan dalam hal pengembangan yang berorientasi pada masyarakat serta berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan demi terciptanya pola hidup masyarakat yang lebih baik, untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat, sebagaimana peran pemerintah dalam konsep Pemberdayaan maka pemberdayaan masyarakat di bagi menjadi dua komponen besar yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak atau tujuan yang harus diberdayakan dan masyarakat yang sudah berkembang dengan perbedaan kelas atau dengan nama lain kelas elit yaitu pemerintah yang menjalankan peran untuk memberdayakan masyarakat.

Peran pemerintah di harapkan baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan mampu memberikan peranan penting serta mampu memberi sumbangsi yang positif kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat dengan harapan pemerintah mampu menjadi objek dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat, mengedepankan perkembangan yang berorientasi pada kemajuan masyarakat dalam kaitannya dengan bidang pertanian. Sehingga masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah baik sebagai penyedia aturan dasar bagi masyarakat demi pengembangan petani (regulator), juga sebagai motor penggerak masyarakat dalam proses untuk pemberdayaan masyarakat

(dinimiasator) serta sebagai media yang mampu menciptakan segala hal yang menjadi kekurangan dan di butuhkan oleh masyarakat (fasilitator) agar tujuan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Labolo, 2010:36).

Menurut pengamatan penulis bahwa kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi mengenai peran pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat, faktanya bahwa Peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo menuai berbagai masalah. Peranan pemerintah sebagai penyedia regulasi masih kurang massif dilihat dari peran pemerintah sebagai penyedia regulasi dalam mendukung kesejahteraan petani (regulator) masih kurang dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada petani sehingga masyarakat petani kurang memahami tentang aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Peran pemerintah sebagai (dinamisator) juga menjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan yang terjadi di Desa Lompoloang Kabupaten Wajo, realita yang terjadi bahwa pemerintah kurang aktif terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan berbagai macam pemahaman dalam mensosialisasikan masalah atau solusi bagi masyarakat petani, selanjutnya pemerintah masih tidak secara aktif dalam mendampingi masyarakat petani seperti memberikan bimbingan secara langsung dalam mengelola pertanian maupun pelatihan kepada masyarakat. Kemudian mengenai pelatihan masyarakat petani sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan pelatihan dari pemerintah untuk mengatasi

masalah yang dihadapi atau kendala yang terjadi masyarakat namun hal tersebut juga belum mampu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, serta Kurangnya keterlibatan pemerintah juga dalam hal turunlangsung ke lapangan melihat kondisi yang terjadi di lapangan juga menjadi faktor utama yang menjadi masalah bagi masyarakat karena pemerintah tidak mampu melaksanakan fungsi tersebut sehingga masyarakat membutuhkan kunjungan lapangan yang lebih terjadwal namun sebaliknya yang terjadi bahwa pemerintah sangat jarang melakukan kunjungan lapangan kemasyarakat demi perkembangan dan keberdayaan masyarakat petani itu sendiri.

Pemerintah selaku penyedia sarana dan prasana bagi masyarakat fasilitator sudah mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani di Desa Lompoloang sebagaimana fungsi pemerintah sebagai media untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi petani, namun dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat petani telah sampai masyarakat namun hal tersebut tidak diindahkan atau kurang dimanfaatkan oleh masyarakat petani karena masalah teknis penggunaan maupun pemanfaatan yang masyarakat itu sendiri kurang paham.

Faktanya bahwa dari hasil pengamatan penulis pada observasi awal sebelum penelitian menemukan bahwa pemerintah sebagai fasilitator tidak mampu menyediakan hal-hal yang di butuhkan oleh masyarakat seperti yang terjadi di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, pada saat musim pengolahan lahan pertanian masyarakat sangat sulit mendapatkan pupuk bahkan

ketersediaan pupuk yg disiapkan oleh pemerintah sangat langka, belum lagi bibit yang di butuhkan masyarakat masih terbatas dimana tidak seimbangya antara jumlah petani yang membutuhkan bibit pupuk dan saprodi lainnya dengan yang tersedia, belum lagi alat-alat pertanian yang disediakan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat hampir dikatakan tidak ada ataupun tidak mencukupi dari kebutuhan masyarakat.

Masalah kelompok tani juga terlihat dari kurang massifnya kerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai petugas untuk mengurus para petani dalam rangka mengawal dan mendamping para petani dalam hal penyuluhan, pelatihan maupun pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat oleh penyuluh pertanian maupun pemerintah desa itu sendiri. Harapan masyarakat agar mampu meningkatkan kondisi kualitas kehidupan masyarakat di desa Lompoloang melalui pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan keterampilan dan proses dalam pengembangan taraf hidup petani masih jauh dari harapan kesejahteraan sesuai dengan tujuan pemerintah dalam dalam hal pemberdayaan.

Mengamati kondisi petani di desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo bahwa permasalahan yang terdapat di atas sudah menjadi bahan perbincangan yang sudah tidak dapat tertutupi lagi bahkan menjadi pembicaraan umum oleh masyarakat setempat serta masyarakat yang berada diluar Desa Lompoloang itu sendiri sehingga masalah peran pemerintah yang masih kurang di daerah tersebut menjadi suatu masalah yang terjadi bagi masyarakat petani, sementara ditinjau dari sudut pandang area pertanian khususnya kelompok Tani di

Desa Lompoloang bahwa begitu luas lahan pertanian yang bisa dikelola namun tidak dapat bermanfaat dengan baik sesuai target yang seharusnya di capai demi keberhasilan dan perkembangan serta kesejahteraan para petani.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di atas sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang sehingga muncul berbagai masalah yang menarik bagi penulis, sehingga dengan kurangnya peran serta pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri sehingga penulis tertarik untuk mengkaji masalah yang terdapat diatas, bahwa dibutuhkan peran pemerintah secara aktif yang mampu memberdayakan masyarakat melalui kelompok tani di Desa Lompoloang. Sehingga penulis memilih judul “ *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lompoloang Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lompoloang Kabupaten Wajo?
3. Bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lompoloang Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat di atas maka Tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai brikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lompoloang Kabupaten Wajo?
2. Untuk mengetahui peran pemerintah sebagai dinamisor dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lompoloang Kabupaten Wajo?
3. Untuk mengetahui peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lompoloang Kabupaten Wajo?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan referensi dan perbaikan untuk mengembangkan penelitian yang di lakukan selanjutnya tentang teori ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok tani.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pemerintah dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan masyarakat pada kelompok tani yang ada di Desa Lompoloang.
- b. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah

Pemerintah secara etimologi di jelaskan oleh pamudji (2012:22-23) berasal dari kata *pemerintah*, sedangkan arti kata pemerintah berasal dari kata *perintah*. namun dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI kata-kata tersebut mempunyai arti yakni, perintah adalah perkataan yang menyuruh atau memberi arahan melakukan sesuatu kepada seseorang. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara. Selanjutnya pengertian pemerintah adalah suatu perbuatan perilaku ataupun tindakan dalam memerintah.

Bahtiar (2011:8) memaparkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dapat dikatakan bahwa dia telah menjalankan suatu peranan. Sementara itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan bahwa:

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Selanjutnya di jelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 7 bahwa peran pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah serta pasal 7 bagian kedua menjelaskan bahwa presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dari

peraturan perundang undangan yang di terbitkan di atas menjadi dasar utama pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai penanggung jawab utama untuk memberi peran penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Dijelaskan oleh Davey (2008:21) bahwa pemerintah memiliki lima fungsi utama dimana diantaranya pertama pemerintah sebagai penyedia layanan artinya bahwa fungsi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan yang mana orientasinya tertuju pada lingkungan dan masyarakat. Kedua, fungsi pengaturan yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan. Yang selanjutnya ketiga pemerintah berfungsi dalam bidang pembangunan yang mana fungsi tersebut berhubungan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yang mewakili masyarakat diluar wilayah mereka dan yang terkahir fungsi pemerintah dalam pengkoordinasian perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Peran pemerintah merupakan keperluan mutlak dalam suatu organisasi baik swasta ataupun organisasi pemerintah dan menjadi salah satu fungsi utamanya yang harus dilakukan oleh pucuk pimpinan yang menjadi pemimpin organisasi. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam suatu organisasi akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut oleh Sutarto dalam Alam (2012:11).

- a. Dalam lingkungan organisasi petugas didalamnya atau perangkat yang ada saling konflik satu sama lain dan membuat kelompok-kelompok bidang kerja atau wewenang yang masing-masing bahwa hanya bidang kerjanya saja yang mereka anggap sebagai pekerjaannya.

- b. Anggota organisasi atau satuan kerja saling melempar tanggung jawab kepada pihak yang lain karena masing- masing individu merasa bahwa tanggung jawab kerja adalah tanggung jawab individu bukan tanggung jawab bersama.
- c. Dalam pencapaian tujuan organisasi semua serba kacau, dimana para peaksana tugas ragu dalam melaksanakan pekerjaan, serba salah, pekerjaan saling berbenturan sehingga sering terjadi tumpang tindah dalam kerja.

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Sehingga konsep dasar dari pemberdayaan adalah berhubungan langsung dengan konsep mengenai kekuasaan (*power*). Sehingga kekuasaan menjadi objek yang selalu berkaitan dengan kemampuan yang di miliki untuk menggunakan kewenangan agar orang lain melakukan hal- hal yang di inginkan meskipun di balik keinginan kita mereka juga memiliki keinginan sendiri yang di kesampingkan. (Suharto, 2014:57). Terkait dengan program pemberdayaan oleh pemerintah, adanya budaya patriarkhi yang masih kuat di kalangan masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat bagi pemberdayaan (Hastuti dan Respati 2009).

Lebih lanjut Menurut Ife dalam (Suharto 2014:58). Bahwa pemberdayaan Memuat dua pengertian kunci yaitu kekuasaan sebagai pemegang kendali dan kelompok bawah yang menerima arahan dan melakukan segala yang di perintahkan oleh penguasa. Namun pembersayaan disini bukan hanya berkaitan

dengan kekuasaan politik dalam arti sempit melainkan kekuasaan dalam arti luas seperti sebagai berikut:

- a) Pilihan pilihan yang dimiliki setiap individu dan kesempatan kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, serta ekerjaan.
- b) Pendefinisian kebutuhan yaitu kemampuan dalam menjabarkan hal yang di anggap penting selaras antara aspirasi dan keinginannya.
- c) Ide atau gagasan dimana kemampuan dalam mngeluarkan pendapat dan memberikan gagasan baru dalam forum diskusi secara bebas dan tanpa tekanan dari siapapun.
- d) Lembaga lembaga yang mampu menjangkau, menggunakan kekuatan dan me mempengaruhi pranata-pranata yang terdapat di masyarakat. Seperti lembaga kesejahteraan sosail, pendidikan, kesehatan dan lemabaga lainnya.
- e) Sumber sumber kemampuan memobilisasi masyarakat untuk pertumbuhan dan perkembangan baik yang bersifat kemasyarakatan, formal maupun informal. Aktivitas ekonomi yang kemampuan menjalanka roda dalam pengelolaan pada mekanisme yang terdapat baik dalam produksi barang atau jasa dengan sistem pendistribusian serta pertukaran anatar barang dan jasa.
- f) Reproduksi kemampuan dalam kaitannya mulai roses persalinan ibu hamil, perawatan anak, sampai pada bagaimana memberikan pendidikan dan sosialisasi.

Masyarakat Merupakan sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama yang mendiami suatu daerah dan berkecimpung antar sesama manusia yang satu dengan lainnya dan saling berbagi informasi. Dimana pada dasarnya secara mendasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari individu lain. Sehingga manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk hidup saling berdampingan dan bersama dalam satu kelompok masyarakat, kemudian untuk mejalani hidup dalam kelompok masyarakat maka antara satu individu dengan individu lainnya masing-masing saling ketergantungan, kaitannya dengan adanya saling membantu setiap individu dengan individu lainnya untuk keberlangsungan hidup dalam mencapai tujuan bersama dalam masyarakat tidak terlepas dari hubungan interaksi antar setiap individu.

Paradigma tentang pemberdayaan masyarakat yang mengemukakan sebagai isu sentral dewasa ini muncul berbagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang tidak bisa terpecahkan terutama antara masyarakat di perdesaan, kawasan terpencil,serta terbelakang. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan. Paradigma pemberdayaan adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat dan merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat yang berakar dari bawah. (Alfitri, 2011:21).

Konsep pemberdayaan tidak terlepas dari konsep utamanya yaitu *power* (daya). Dijelaskan oleh Suriadi (2005:54-55) bahwa terkait dengan konsep pemberdayaan *power* dapat di pahami dan di jelaskan dalam empat sudut pandang yaitu perspektif *pluralis*, prespektif *elitis*, prespektif *strukturalis*, dan

prespektif *post-strukturalis*. Pemberdayaan ditinjau dari sudut pandang prespektif *pluralis* merupakan proses untuk mendorong kelompok individu maupun masyarakat yang kurang beruntung untuk bersaing secara sehat dan adil serta efektif dengan berbagai kepentingan dengan tujuan agar masyarakat lebih merasa memerlukan kegiatan untuk belajar tentang bagaimana menggunakan keahlian melalui objek tertentu seperti media dan sebagainya yang berhubungan dengan tindakan politik, pemberdayaan masyarakat ditinjau dari Prespektif *elitis* merupakan suatu upaya untuk bergabung dan memengaruhi elit-elit, membentuk aliansi dengan *elitis* serta melakukan konfrontasi dan kerjasama antar lini untuk mencari perubahan pada elitis. Kurang berdayanya masyarakat dikarenakan adanya *power* dan kontrol yang besar dari para elit terhadap media, pendidikan, partai politik, birokrasi dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat juga ditinjau dari sudut pandang prespektif *strukturalisasi* dimana suatu agenda yang menantang dan dapat dicapai jika bentuk dari kepentingan yang terdapat di struktural dapat *dieliminasi*, sehingga masyarakat tak berdaya merupakan suatu bentuk struktur dominan yang melakukan penindasan masyarakat, seperti permasalahan kelas sosial, perbedaan gender, suku, ras dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa perbedaan masyarakat merupakan suatu proses pembebasan dan perubahan struktural secara fundamental. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat ditinjau dari prespektif *post-struktural* adalah suatu proses yang menentang dan mengubah diskursus sehingga pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek *intelktualisasi* ketimbang aktivitas

aksi atau pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk upaya pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru.

Penjelasan Suhendra (2006:74-75) mengenai pemberdayaan menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu bentuk kegiatan yang berlangsung secara berulang-ulang dan berkesinambungan, dinamis serta bersinergi dengan seluruh pihak dalam mendorong keterlibatan potensi yang ada secara *evaluatif* demi terlibatnya semua potensi. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat dipahami dengan arti bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebar kekuasaan melalui pemberdayaan masyarakat dan organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya sendiri untuk aspek kehidupan yang ada seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pendidikan dan semua aspek. Suhendra mengemukakan ada beberapa unsur yang terkait dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Kualitas politik yang memadai dan mendukung
2. Terciptanya suasana yang kondusif dalam mengembangkan potensi secara menyeluruh
3. Motivasi
4. Kualitas yang dimiliki masyarakat
5. Tersedianya peluang bagi masyarakat
6. Kerelaan mengalihkan wewenang
7. Perlindungan kepada masyarakat
8. Memiliki kesadaran

Pemberdayaan masyarakat di kenal secara luas oleh masyarakat sebagai bentuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Serta dapat pula dianggap sebagai cara dalam mengangkat harkat dan martabat baik individu maupun kelompok masyarakat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang pengimplementasiannya di tujukan pada pembangunan masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengembangan dan kemajuan yang lebih baik dan berkualitas maka diperlukan beberapa program untuk pembangunan dengan bentuk inovasi-inovasi yang dikembangkan dengan mengandung unsur sebagai berikut, Pitana (2006:137):

1. Memberikan keuntungan secara relatif, ditinjau dari segi ekonomi dapat terjangkau dan dianggap bahwa biaya yang dikeluarkan lebih kecil terhadap hasil yang diperoleh sebelumnya (*relative advantage*).
2. Unsur-unsur dari terobosan yang ada dianggap tidak terjadi masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai dan system kepercayaan (*compatibility*).
3. Praktek dan gagasan yang baru dikomunikasikan dapat mudah dimengerti dan mampu di laksanakan (*complexity and practicability*), sehingga inovasi yang ada dapat dengan mudah diobservasi hasilnya (*observability*).

Dari pemaparan mengenai peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang ada diatas maka, ada tiga komponen utama yang harus ada dalam konsep pemberdayaan masyarakat Pitana (2015:138-129) yaitu :

1. *Enabling setting*, yaitu untuk memperkuat segala situasi dan kondisi yang berada pada tingkat lokal menjadi lebih baik, sehingga semua orang mampu berkreasi. Ibaratnya, menciptakan wadah atau tempat yang baik untuk berekspresi, sehingga seluruh masyarakat mampu dan bebas melakukan apa yang diinginkan di tersebut dengan tujuan dan maksud untuk pengembangan baik pada tingkat kelompok maupun individu.
2. *Empowering local community*. Kemudian apabila wadah atau panggung tersebut sudah tersedia, maka peningkatan kemampuan masyarakat harus dilakukan yang artinya bahwa setelah *local setting* tersebut diperadakan maka harus dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan, pelatihan, dan berbagai bentuk kegiatan yang menyangkut dengan peningkatan sumber daya manusia yang diperlukan.
3. *Socio-political support* apabila wadah atau tempat sudah memadai serta masyarakat lokal sudah mampu menari, maka diperlukan adanya perangkat pendukung yang lain seperti, perangkat perlengkapan, penonton dan lainnya. Dengan kata lain bahwa perlu adanya dukungan baik dukungan politik, sosial, jaringan serta semua yang bersangkutan. Karena apabila dukungan politik, ekonomi, sosial yang memadai maka masyarakat tidak dapat dengan mudah berkreasi pada tempat yang telah disediakan meskipun yang sebenarnya bahwa masyarakat tersebut secara umum dikatakan mampu melakukannya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada bab 2 tentang asas, tujuan, dan lingkup pengaturan dijelaskan pada pasal 3 yaitu:

1. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.
2. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani.
3. memberikan kepastian Usaha Tani.
4. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.
5. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan dan
6. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pada pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga di jelaskan bahwa Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan.
- b. Perlindungan Petani.
- c. Pemberdayaan Petani.
- d. pembiayaan dan pendanaan.
- e. pengawasan.
- f. peran serta masyarakat.

Telah diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan

Pelatihan Pertanian Swadaya pada Bab III mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya bahwa dalam hal pengembangan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat maka pemerintah harus mampu menerapkan serta melaksanakan kegiatan melalui apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, dan pelatihan.

.Sehingga pelaksanaan Pengembangan poktan dan gapoktan tersebut diselenggarakan di semua tingkatan wilayah administrative di Indonesia. Organisasi yang bertanggung jawab dan melaksanakan pendampingan demi menumbuh kembangkan tiap-tiap poktan dan gapoktan tersebut di laksanakan oleh kelembagaan pada tingkat pusat kementrian pertanian dan perkebunan, kemudian tingkat regional dan daerah dinas pertanian dan perkebunan terkait serta penyuluhan pertanian baik pada tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi maupun pada tingkat pusat itu sendiri. Sehingga dalam menciptakan program penyuluhan pertanian baik pada tingkat Desa/kelurahan, kecamatan serta kabupaten/kota, maupun pada unit kerja lainnya akan disesuaikan dengan kondisi poktan dan gapoktan yang ada di lapangan. Poktan dan gapotkan yang menjadi objek utama dalam pelaksanaan pemberdayaan petani bagi pemerintah merupakan suatu tantangan yang telah berlanjut dari beberapa dekade terakhir yang menjadi suatu permasalahan yang begitu rumit dan kompleks karena banyaknya tipe-tipe masyarakat yang berbeda disetiap daerah, belum lagi letak kondisi geografis yang berada pada daerah kepulauan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

1. Memfasilitasi terselenggaranya program penyuluhan pertanian desa atau unit kerja lapangan di wilayah kerja BP3K.
2. Memfasilitasi proses pembelajaran petani dan pelaku agribisnis lainnya sesuai dengan kebutuhannya.
3. Menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi usahatani.
4. Melaksanakan kaji terap dan percontohan usahatani melalui penerapan teknologi yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).
5. Mensosialisasikan rekomendasi dan mengihtiarkan akses kepada sumber-sumber informasi yang dibutuhkan petani.
6. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat kecamatan (musyawarah/rembug tani, temu wicara serta koordinasi penyuluhan pertanian).
7. Memfasilitasi kerjasama antara petani, penyuluh pertanian, dan peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi usahatani yang menguntungkan serta akrab lingkungan.
8. Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan petani serta pelaku agribisnis lainnya.
9. Menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para petani dan atau masyarakat lainnya yang membutuhkan.
10. Memfasilitasi terbentuknya gapoktan serta pembinaannya.
11. Menginventarisasi poktan dan kelembagaan petani lainnya yang berada di wilayah BP3K.
12. Memfasilitasi gapoktan dalam merekapitulasi RDK dan RDKK dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas RDK dan RDKK.

13. Melakukan kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan poktan serta memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan poktan.

14. Melaporkan kegiatan penyuluhan dan pemutakhiran data poktan dan gapoktan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan.

C. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Siagian (2009:142) mengemukakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam hal proses pembangunan nasional. Sehingga terdapat beberapa peran pemerintah yang menjadi tolak ukur utama yaitu:

1. Pemerintah selaku stabilitator, bahwa peran pemerintah selaku stabilitator dalam rangka mewujudkan adanya keseimbangan sosial yang berorientasi pada keestabilan kondisi sosial dimasyarakat.
2. Peran pemerintah sebagai inovator, sebagai inovator pemerintah sebagai pelaksana dalam melahirkan ide-ide yang kreatif dan baru dalam hal pembangunan, inovasi baru yang dihasilkan pemerintah baik berupa metode maupun pelaksanaan dengan sistem dan pola berfikir baru untuk kemajuan dan kemandirian masyarakat. Sehingga situasi dan kondisi yang dihasilkan dari inovasi pemerintah tepat sasaran sehingga peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tetap efektif.
3. Pemerintah sebagai modernisator, dalam hal ini pemerintah berfungsi untuk mengarahkan dan mendorong masyarakat untuk berfikir maju dan hidup modern, dari sistem di berbagai Negara menunjukkan bahwa apabila pemerintah ingin memainkan peran modernisator di lingkup masyarakat luas

maka sebelumnya proses modernisasi harus terlaksana lebih awal di lingkup birokrasi pemerintah itu sendiri.

4. Pemerintah selaku pelopor, artinya bahwa dalam kehidupan bernegara pemerintah harus menjadi pelopor untuk masyarakat, sehingga sebagai pelopor utama maka pemerintah harus mampu menjadi panutan utama (*role model*) untuk semua kalangan masyarakat.
5. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri, artinya bahwa pemerintah di harapkan agar menjadi pelaksana yang mampu memainkan peran sebagai pelaksana sendiri di berbagai kegiatan meskipun diharapkan bagi masyarakat petani bahwa terjadinya kemajuan dan kemandirian masyarakat maka makin berkurang pula peranan pemerintah yang secara langsung di tujukan kepada kelompok masyarakat itu sendiri.

Sebagai bentuk peran pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan Negara dalam bentuk peran pemerintah maka perlua adanya peranan yang aktif kepada masyarakat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki dengan memberikan peran secara aktif kepada masyarakat menurut Labolo (2010:36) mengemukakan bahwa ada tiga dasar peran pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan

Fungsi primer atau fungsi pelayanan merupakan fungsi pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan publik yang tidak dapat di sembunyikan termasuk dalam hal pertahanan dan keamanan Negara, serta pelayanan masyarakat dan birokrasi.

2. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan

Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan yaitu pemerintah sebagai penyedia kebutuhan masyarakat dan permintaan masyarakat mengenai barang dan jasa yang tidak mampu dipenuhi Karena kurang berdayanya masyarakat dalam hal saran dan prasarana, sementara dalam fungsi pemberdayaan ada tiga peran pemerintah yaitu:

a. Peran pemerintah sebagai regulator

Pemerintah sebagai regulator artinya bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan. Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya di pahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat mengenai aturan dan mekanisme.

Peran regulator kemudian dikembangkan dengan merujuk pada aspek aturan atau mekanisme. Hal ini dimaksudkan bahwa terkait dengan aturan atau mekanisme haruslah diciptakan oleh pemerintah agar menjadi sebuah patokan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan batasan-batasan setiap individu atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya, sehingga aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya di

ciptakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh.

b. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, arahan dan masukan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam memelihara dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memeberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk lebih mengembangkan pembahasan terkait dengan dinamisator kemudian diuraikan dalam beberapa aspek, yaitu (1) sosialisasi, (2) pendampingan, (3) pelatihan dan (4) kunjungan lapangan. Sosialisasi yang memiliki pengertian secara umum yaitu proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Pendampingan dalam hal ini dipahamai sebagai suatu kegiatan yang menempatkan tenaga yang ahli di bidang pemberdayaan kelompok tani yang mampu berkomunikasi, mengarahkan dan memberi motivasi kepada masyarakat. Kemudian pelatihan ialah serangkaian aktifitas yang dirancang untuk

meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat. Kunjungan lapangan adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terjadwal ke suatu lokasi dengan secara langsung meninjau dan memperhatikan situasi dan kondisi dilapangan.

c. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitaas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang aman, nyaman dan terbit. Seperti menyediakan saran dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia pada khususnya. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan.

Kemudian dengan melihat peran dari fasilitator itu sendiri tentunya memiliki tanggung jawab hingga kewenangan dalam memperadakan segala bentuk kebutuhan untuk keberlangsungan sautu kegiatan. Dengan tersedianya bibit unggul, pupuk dan sarana produksi lainnya sudah tentu akan mendorong partisipasi dari masyarakat untuk memanfaatkannya sehingga peran dari fasilitator dalam kegiatan ini dapat lebih optimal.

D. Kerangka Fikir

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang di ciptakan pemerintah dalam memberikan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk konsep pemikiran yang di tuangkan serta pelaksanaannya di tengah masyarakat. Untuk melihat peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu sebagai regulator dimana didalamnya terdapat aturan mendasar tentang mekanisme pemberdayaan serta bejikan yang di keluarkan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah sebagai dinamisator didalam di dalamnya terdapat peran pemerinath dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan, kemudian indikator ketiga pemerintah sebagai fasilitator dimana di dalamnya terdapat peran pemerintah dalam hal pengadaan bibit unggul, pengadaan pupuk, pestisida dan sarana produksi untuk pemberdayaan petani.

Peran pemerintah yang lakukan di Desa Lompoloang Kabupaten wajo merupakan bentuk kerja pemerintah untuk memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal pertanian, dan pemerintah juga berperan penting dalam menerbitkan aturan yang mendasar untuk menjadikan pola umum dalam mencapai tingkat kesejahteraan petani khususnya kelompok tani dan beberapa gabungan kelompok tani (Gapoktan) serta menjadi motor penggerak bagi seluruh lapisan masyarakat baik tingkat regional maupun tingkat pusat untuk bekerjasama dalam mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat khususnya pada kelompok tani.



E. Fokus Penelitian

Pokus penelitian ini adalah untuk melihat peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani melalui tiga indikator dapat dilihat sebagai berikut:

a) Peran pemerintah sebagai regulator

Regulator yang didalamnya terdapat aturan-aturan atau mekanisme serta kebijakan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan.

b) Peran pemerintah sebagai dinamisator

1. Sosialisasi
2. Pendampingan
3. Pelatihan
4. Kunjungan lapangan

- c) Fasilitator
 - 1. Penyedia bibit unggul
 - 2. Pupuk dan pestisida
 - 3. Sarana produksi

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dari kerangka fikir yang terdapat diatas maka dapat kita temukan deskripsi fokus sebagai brikut:

1. Peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya pada petani harus aktif dan berkesinambungan, peran sebagai pelaksana kebijakan harus mampu melakukukan tiga fungsi utama yaitu regulator, dinamisator dan fasilitator.
2. Pemerintah sebagai regulator, merupakan dasar aturan berlaku yang disiapkan pemerintah untuk mengatur setisap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
3. Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah untuk memberikan arahan dan bimbingan melalui pendampingan kepada masyarakat sehingga dengan adanya bimbingan maka masyarakat lebih berdaya guna.
4. Pemerintah sebagai fasilitator adalah untuk memperadakan fasilitas yang di butuhkan masyarakat baik saran dan prasarana untuk kebutuhan pemberdayaan seperti bibit, pupuk dan alat-alat pengolahan lainnya.
5. Pengembangan petani yang dimaksud adalah adanya sebuah dorongan dan perubahan baru yang dilakukan hasil dari hubungan kerja sama pemerintah dan masyarakat.

6. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh kebutuhan baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu kurang lebih selama dua bulan terhitung setelah ujian proposal dilaksanakan, sehingga adapun perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu berkisar mulai bulan juli sampai agustus tahun 2018.

Penelitian ini memilih lokasi di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Alasan peneliti mengambil lokasi di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo berdasar pada apa yang terjadi dalam Proses Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya pada kelompok tani tersebut telah berlangsung pemberdayaan petani namun masih terlihat kurangnya peranan pemerintah secara nyata di masyarakat serta beberapa kondisi yang belum sesuai dengan harapan dan regulasi yang ada dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengumpulkan data serta informasi dari sejumlah informan kunci yang dianggap bisa memberikan informasi yang akurat lebih mendalam.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian fenomenologi. yaitu Tipe penelitian yang memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan Sugiyono (2009) .

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer data yang diperoleh dengan penelitian yang berupa hasil wawancara atau pengamatan kepada para informan dari masyarakat dan pemerintah desa Lompoloang yang memberikan informasi secara jelas dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani.
2. Data sekunder data yang diperoleh dengan dokumen-dokumen atau laporan-laporan tertulis dan tidak tertulis dari kantor desa Lompoloang mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani.

D. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* agar dapat menentukan informan penelitian. *Purposive sampling* adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*contructions*), sehingga teknik ini di gunakan untuk merinci segala informasi dan menggali informasi yang akan menjadi dasar dari teori yang akan muncul, menurut Moeleong (2014:224). Table informan sebagai berikut:

Tabel 3.1: Table Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah Informan
1.	Muhajirin Abduh, S.P.,M.M (MA)	1 orang
2.	Muh. Yunus, S.P (MY)	1 orang
3.	Muhammad Ali, S.Sos (MA)	1 orang
4.	Abdul Rahim (AR)	1 orang
5.	Maskur (MS), Mustamin (MT)	2 orang
6.	Andi Amir (AA), Sanire (SN)	2 orang
JUMLAH		8 orang

E. Tehnik Pengumpulan Data

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian dibutuhkan data-data yang menunjang kredibilitas penelitian ini, maka dari itu di dalam penelitian ini peneliti menggunakan dan mengabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (Sukmadinata, 2012 : 220), Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dengan teknik observasi peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian, sehingga peneliti dapat melihat dan menarik kesimpulan terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lompoloang Kabupaen Wajo

2. Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan agar memperkuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara tanya jawab langsung lisan dengan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik seperti, foto-foto, tempat penyimpanan arsip. Dokumentasi dibutuhkan karena dapat menunjang keabsahan sebuah hasil penelitian.

F. Tehnik Analisis Data

Menurut Meles dan Hubrmen (1984) (dalam Sugiyono, 2016 : 246) menegemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : Data Reduksi, Data display dan conclusion drawing / verification.

1. Reduksi Data

Reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian, bagi peneliti pemula proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian atau penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingatkan bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles dan Huberman (1984) memperkenalkan dua macam format, yaitu : diagram konteks (*context chard*) dan matriks.

3. Conclusion *Drawing*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, menurut Sugiyono (2009:274) bahwa yang berukuran benar-benar variabel yang ingin diukur. Keabsahan data dapat dicapai dengan pengumpulan data dengan cepat. Salah satunya dengan cara proses triangulasi, teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan serta sebagai pembandingan terhadap data

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dengan membandingkan cara mengecek ulang tingkatan kepercayaan informasi yang diperoleh dengan sumber yang berbeda.

Membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, membandingkan yang dijelaskan umum dan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Teknika untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk melihat kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti data yang diperoleh dengan wawancara, selanjutnya dicetak dengan teknik observasi, dokumentasi dan kuesioner.

3. Triangulasi Waktu

Trigulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berhubungan erat dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara da berbagai waktu perubahan dari waktu kewaktu. Agar mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Obyek Penelitian

Sebelum memulai pembahasan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Maka penulis akan memaparkan mengenai tentang monografi kondisi lokasi penelitian Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten wajo terlebih dahulu.

1. Letak Geografis Kabupten Wajo

Kabupaten Wajo adalah salah satu kabupaten yang letaknya berada di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Salah satu Kabupaten yang berseblahan dengan kabupaten luwu pada bagian timur, Kabupaten Sidrap pada bagian barat kabupaten soppeng bagian utara, serta di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Bone.

letak kondisi geografis Kabupaten Wajo yang berada di tengah-tengah Kabupaten lainnya menjadikannya sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi yang kaya akan sumber daya alamnya dengan jumlah penduduk yang seimbang megindikasikan akan terlaksananya pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien, dengan ketersediaan begitu banyak potensi sumber daya alam yang belum dikelola serta dimanfaatkan dengan baik maka pembagian daerah menjadi salah satu kunci agar pengelolaan sumber daya alam dapat dengan mudah di laksanakan. Berikut tabel dari pembagian wilayah pertanian dan perkebunan pada Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Wajo:

Tabel 4.1 pembagian wilayah kabupaten wajo

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Sabbangparu	12	3
2	Tempe	-	16
3	Pamma	13	2
4	Bola	10	1
5	Takkalalla	11	2
6	Penrang	9	1
7	Majauleng	14	4
8	Tanasitolo	15	4
9	Belawa	6	3
10	Maniangpajo	5	3
11	Gilireng	8	1
12	Keera	9	1
13	Sajoanging	6	3
14	Pitumpanua	10	4
	Jumlah	128	48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten wajo

2. Kondisi Geografis Desa Lompoloang

Kondisi geografis Desa Lompoloang yang berada pada posisi yang strategis pada daerah pedesaan terpencil yaitu tepatnya di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Letak wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten

menjadikan Desa Lompoloang sebagai salah satu desa terpencil yang berbatasan dengan Kabupaten Sidrap. Sebagian besar wilayah Desa Lompoloang berada di daerah perbukitan/dataran tinggi dengan rata-rata ketinggian 500 mdpl. Luas wilayah desa 4.505 km² yang terdiri dari 4 dusun, luas lahan pertanian 489,32 ha, luas lahan perkebunan 900 ha, panjang jalan 20 km.

Kondisi Desa Lompoloang yang terletak jauh dari kota kabupaten menjadikan Desa Lompoloang sebagai sebagai salah satu desa terpencil yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidrap. Wilayah Desa ini tidak memiliki peisisir pantai. Iklim tropis menjadikan wilayah ini memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan suhu rata-rata 30°C dengan curah hujan rata-rata 3.847 mm.

3. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Pelayanan Terbaik Melalui Sumber Daya Yang Berkualitas Menuju Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Misi

1. Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Desa
3. Menciptakan suasana yang kondusif dan inovatif bagi pemerintah Desa dan masyarakat
4. Memantapkan koordinasi dan kemitraan.

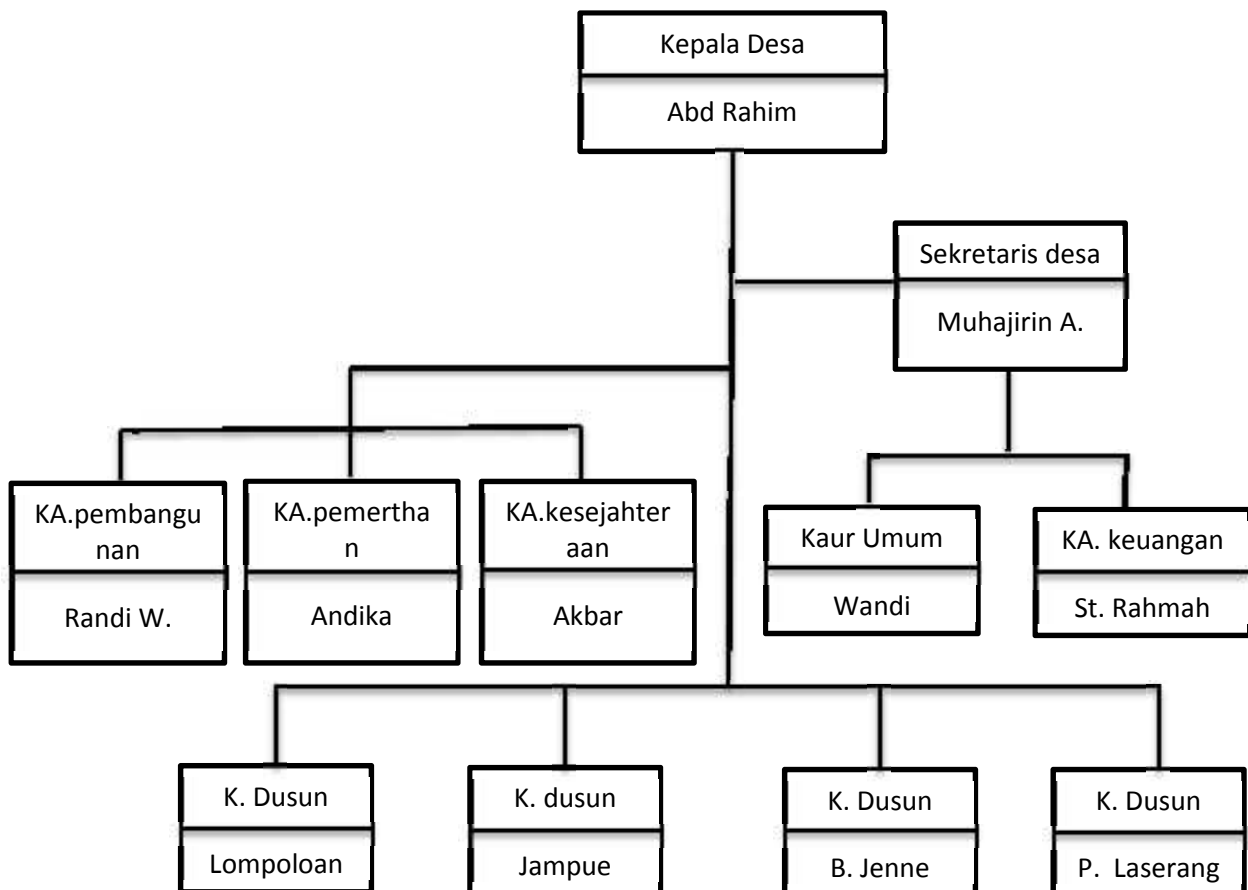
4. Struktur Pengurus Desa Lompoloang

Desa merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat yang memiliki hukum serta batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat di daerah setempat, didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adapun struktur pemerintahan desa Lompoloang sebagai berikut:

Kepala Desa : Abdul Rahim
 Sekretaris Desa : Muhajirin Abduh A.Md.Kom
 Kaur Umum : wandi
 Kaur Keuangan : Sitti Rahmah
 KA Pemerintahan : andika
 KA Pembangunan : Randi wiranata
 KA. Kesejahteraan : akbar

Gambar 4.1 Struktur Pengurus Desa Lompoloang



Sumber: Pemerintah Desa Lompoloang

5. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Lompoloang

- a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan dan menjalankan roda pemerintahan Desa, serta melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Sekretaris Desa memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa di bidang administrasi pemerintahan desa, dan membantu Kepala Desa untuk menetapkan kebijakan pemerintah Desa.
- c. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa untuk mengurus ketatausahaan Desa, urusan umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian kepala urusan umum juga memiliki fungsi sebagai pembantu dibidang administrasi surat menyurat, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat dan pelayanan umum.
- d. Kepala Urusan Keuangan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan keuangan serta berfungsi dalam hal mengurus administrasi keuangan, baik pendapatan dana desa maupun pengeluarannya dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan lainnya.
- e. Kepala Urusan Pemerintahan bertugas untuk pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta berfungsi untuk melaksanakan manajemen tata pemerintahan membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan

ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

- f. Kepala Urusan Kesejahteraan memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas teknis dan oprasional lainnya.
- g. Kepala urusan Pembangunan bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa dan berfungsi untuk melaksanakan pembangunan yang di damping oleh Kepala Desa.

B. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani

Pemerintah sebagai regulator artinya bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan. Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya di pahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat.

1. Aturan/mekanisme dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat

Aturan atau mekanisme yang diciptakan pemerintah merupakan sebuah patokan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan batasan-batasan setiap individu atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya, sehingga

aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya di ciptakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan MA selaku staf Dinas Pertanian bidang perkebunan Kabupaten Wajo mengatakan bahwa:

“Selaku dari pihak pemerintah kabupaten kami tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai kelompok tani sehingga kami hanya mengikut dari aturan umum yang berlaku” (hasil wawancara tanggal 07 juni 2018).

Terkait dengan pernyataan yang di berikan oleh salah satu staf finas yang di wawancarai bahwa mengenai aturan yang berlaku di Kabupaten Wajo khususnya tidak ada aturan atau perturan daerah yang khsus untuk menangani masalah tersebut sehingga aturan yang berlaku sesuai dengan pola umum yang di turunkan dari pusat.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) MY mengatakan bahwa:

“saya selaku penyuluh yang ditugaskan di tempat ini tidak paham atau kurang memahami tentang aturan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat petani seperti aturan dari pusat maupun daerah atau kabupaten,” (hasil wawancara tanggal 11 juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh pertanian lapangan mengatakan bahwa mengenai aturan pemberdayaan kelompok tani tidak ada aturan yang di keluarkan dari kabupaten tapi cuman bersifat aturan dasar dari pusat. Hampir sama apa yang disampaikan MA selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat kecamatan pitumpanua mengatakan bahwa:

“aturan tentang pemberdayaan masyarakat petani khususnya di kecamatan pitumpanua desa lompoloang tidak diketahui dan tidak ada informasi dari

kabupaten tentang aturan dasar yang diatur oleh pemerintah daerah mengenai pemberdayaan kelompok tani sehingga pemerintah kecamatan itu sendiri hanya memahami bahwa aturan yang digunakan di masyarakat adalah turunan dari pemerintah pusat”. (hasil wawancara pada tanggal 18 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bidang pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa mengenai aturan tentang pemberdayaan masyarakat petani tidak di ketahui dan tidak ada informasi dari kabupaten tentang aturan dasar yang diatur oleh pemerintah daerah mengenai pemberdayaan kelompok tani.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan AR sebagai kepala Desa Lompoloang mengayakan bahwa:

“untuk aturan dan mekanisme yang mengatur tentang pemberdayaan kelompok tani saya tidak tahu apa-apa dan tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah kabupaten, kendalanya juga kenapa kami di Desa kurang mengetahui tentang peraturan-peraturan yang ada karena tidak pernah ada kegiatan atau semacamnya yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah dalam memberikan sosialisasi tentang peraturan tersebut ”, (hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala desa lompoloang bahwa mengenai aturan tentang pemberdayaan kelompok dia tau tentang aturan tersebut.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan MS selaku ketua kelompok tani Bunga Mekar hampir sama apa yang di sampaikan oleh kepala Desa Lompoloang bahwa:

“aturan dan mekanisme tentang pemberdayaan masyarakat petani saya tidak tahu menahu dek karena kami anggota kelompok tani tidak pernah di jelaskan oleh pemerintah atau tidak pernah ada kegiatan yang berkaitan sama hal-hal tentang peraturan“, (hasil wawancara pada tanggal 26 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari ketua kelompok tani bahwa aturan yang mengatur maupun mekanisme pemberdayaan masyarakat petani khususnya desa Lompoloang tidak paham dan tidak mengetahui hal tersebut.

Kemudian dari hasil wawancara dengan MT selaku ketua kelompok tani Sabar Menanti bahwa:

“berbicara aturan dan sejenisnya masalah kelompok tani itu saya tidak tahu undang-undangnya yang mana pasalnya berapa and sebagainya, karena kami masyarakat biasa tidak pernah diberitahu dari pemerintah mengenai aturan ini”, (hasil wawancara pada tanggal 26 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari ketua kelompok tani diatas bahwa masalah aturan yang mengatur maupun mekanisme tentang pemberdayaan masyarakat petani khususnya masyarakat di Desa Lompoloang itu sendiri kurang paham dan tidak mengetahui hal tersebut sehingga masyarakat seolah-olah hanya jalan sesuai perintah tapi tidak mengetahui tentang apa yang dilakukan..

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada AA selaku salah satu masyarakat yang tergabung sebagai anggota kelompok tani Bunga Mekar bahwa:

“kalau itu aturan aturan masalah kelompok tani atau semacamnya kami semua disini yang anggota kelompok tani dusun ini tidak ada yang tau tentang aturan yang mengatur masalah petani apalagi pemerintah nda pernah mau menjelaskan kepada kita disini aturan yang anda katakan” (hasil wawancara pada tanggal 28 juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu anggota kelompok tani tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan pemberdayaan kelompok tani masyarakat sebagai pengurus yang tergabung dalam kelompok tani kurang paham secara umum dengan aturan yang terkait dengan pemberdayaan kelompok tani

apalagi secara khusus berbicara undang-undang dan pasal yang mengatur sehingga masyarakat hanya sekedar menjalankan perintah dari pemerintah apabila terdapat arahan atau masukan dari pemerintah mengenai kelompok tani.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa mengenai aturan/ mekanisme serta kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan kelompok tani, peneliti menarik sebuah kesimpulan jika yang terjadi di masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang aturan yang jelas untuk menjadi pedoman bagi masyarakat untuk diberdayakan, dilihat dari keterangan yang telah disampaikan oleh pihak pemberdayaan masyarakat atau PPL bahwa bukan hanya masyarakat awam saja yang kurang paham dengan regulasi yang berlaku tetapi PPL selaku pemerintah yang melaksanakan tugas pemberdayaan juga kurang paham dengan aturan yang berlaku, sementara regulasi tentang pemberdayaan masyarakat telah diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang kemudian lebih di fokuskan lagi pada turunan peraturan berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta di pertegas lagi agar lebih terperinci untuk menyesuaikan kebutuhan pemberdayaan dengan daerah pemberdayaan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Masalah kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat yang memberikan pemahaman kepada masyarakat petani tentang aturan dasar yang

berlaku bagi kelompok yang diberdayakan juga menjadi kendala yang rumit sehingga masyarakat minim akan pengetahuan mengenai aturan-aturan serta mekanisme yang mengatur masalah pemberdayaan kelompok tani. Hal inilah yang menjadi masalah utama sehingga masyarakat kurang pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat petani di Desa Lompoloang. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat serta keterbatasan media di pedesaan sehingga masyarakat yang ikut dengan program pemberdayaan hanya sekedar ikut tanpa ada pembekalan pengetahuan mengenai aturan dan kebijakan pemerintah, dari pihak pemerintah kecamatan sendiripun tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang aturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku dalam proses pemberdayaan masyarakat petani karena faktanya dari hasil wawancara dan observasi peneliti pemerintah kecamatan sendiri tidak memahami hal tersebut, namun sesuai dengan indikator regulator ditinjau dari peran pemerintah dalam menyediakan aturan sudah termasuk mampu menyediakan aturan untuk pemerintah namun karena kurangnya kerja pemerintah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat membuat masyarakat kurang paham dengan hal tersebut.

C. Peran pemerintah sebagai dinamisor dalam pemberdayaan kelompok tani

Pemerintah sebagai dinamisor merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Peran pemerintah sebagai dinamisor berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh

kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, arahan dan masukan dari pemerintah sangat di butuhkan dalam memelihara dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memeberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan dan menerjemahkan segala kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Pada dasarnya Pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di Desa lompoloang dengan malakukan pertemuan dengan para anggota kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) untuk membahas mengenai masalah atau kendala yang di hadapi oleh masyarakat petani demi menemukan solusi dari permasalahan yang ada serta pemerintah memberikan pengarahan dan membantu petani menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang di hadapai di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan MA selaku salah satu staf Dinas Pertanian bidang perkebunan Kabupaten Wajo yang menyatakan bahwa:

“sosialisasi biasanya kami ajukan kepada PPL untuk dilaksanakan apabila terdapat program dari pemerintah provinsi atau pusat untuk dilaksanakan di daerah”, (hasil wawancara pada tanggal 07 juni 2018),

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari staf dinas pertanian bahwa hanya akan dilaksanakan sosialisasi tingkat desa atau kecamatan apabila

pemerintah pusat atau provinsi memberikan program untuk dilaksanakan di daerah sehingga program itu kami limpahkan ke Penyuluh Pertanian Lapangan untuk dilaksanakan di daerah dan itu berkerja sama dengan pemerintah kabupaten. Selanjutnya hampir sama yang di sampaikan MY selaku Penyuluh Pertanian Lapangan yang mengatakan bahwa:

“sosialisasi saya lakukan secara tidak terjadwal karena saya dari pihak PPL hanya turun kelapangan melakukan sosialisasi apabila ada perintah dari kabupaten atau dinas pertanian dan apabila saya turun sosialisasi maka sekaligus juga membahas hal-hal yang menjadi masalah yang dihadapi para petani”, (hasil wawancara pada tanggal 11 juni 2018).

Hasil wawancara dari Penyuluh Pertanian Lapangan mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan tidak teratur dan terjadwal karena hanya menunggu arahan dan perintah dari pemerintah kabupaten atau dalam dinas pertanian.

Selanjutnya dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada MA selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat kecamatan pitumpanua bahwa:

“saya selaku pihak dari kecamatan kurang ikut serta atau dapat dikatakan jarang ikut serta apabila Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) atau pihak Dinas terkait melakukan sosialisasi karena saya sendiri baru ikut sosialisasi masalah kelompok tani apabila ada undangan pemberitahuan dari PPL untuk ikut ke Desa sosialisasi Karena kami juga dari pihak kecamatan punya batak wewenang yang bisa serta merta terjun sosialisai tanpa ada undangan atau pemberitahuan dari pihak pemerintah Kabupaten Wajo atau PPL’, (hasil wawancara pada tanggal 18 juni 2018).

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak kecamatan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas terkait dari kabupaten dari pihak kecamatan itu sendiri kurang ikut serta dalam melakukan sosialisasi karena dari pihak kecamatan itu sendiri bisa ikut dalam sosialisasi

kepada masyarakat apabila ada undangan atau pemberitahuan untuk turun ke masyarakat dari pihak dinas Pertanian Kabupaten Wajo atau pihak PPL Kepada kecamatan.

Berbeda dengan hasil wawancara dan perbincangan yang dilakukan peneliti kepada MS selaku ketua kelompok tani Bunga Mekar bahwa:

“saya dan teman-teman anggota kelompok tani di daerah sini sudah mendapatkan jadwal bergiliran setiap kelompok tani dari PPL untuk sosialisasi tapi ternyata itu jadwal nda ada gunanya karena biasa tiap minggu kami menunggu PPL untuk datang sosialisasi tapi tidak datang-datang”, (wawancara pada tanggal 26 juni 2018).

Dari hasil wawancara oleh ketua kelompok tani bahwa sosialisasi yang di dapat oleh PPL tidak berjalan sesuai dengan perencanaan di awal-awal sehingga tidak adanya sosialisasi yang berlangsung secara rutin dan terjadwal. Hampir sama dengan yang disampaikan MT selaku ketua kelompok tani Sabar Menanti kepada peneliti bahwa:

“Sebagai ketua kelompok tani saya pribadi tahu jika jadwal sosialisasi dari PPL itu secara bergiliran tapi ternyata jadwal pergiliran itu tidak sesuai karena biasa tiba waktunya jadwalnya kelompok kami menerima sosialisasi tapi tidak ada juga yang dilaksanakan padahal kami dan warga disini sudah menggu”, (hasil wawancara pada tanggal 26 juni 2018).

Dari hasil wawancara oleh salah satu ketua kelompok tani diatas maka dapat dinyatakan bahwa sosialisasi yang di lakukan oleh PPL tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal sehingga tidak adanya sosialisasi yang berlangsung secara rutin dan terjadwal membuat masyarakat petani mengeluh karena jadwal sebelumnya yang diketahui tidak berjalan dengan baik.

Lebih lanjut hampir sama yang di sampaikan ketua kelompok tani juga disampaikan AA selaku anggota kelompok tani Bunga Mekar bahwa:

“saya dan warga sekitar disini yang bergabung di kelompok tani tidak tahu jelas bagaimana sebenarnya jadwal sosialisasi karena biasa saya menunggu sosialisasi di lakukan tapi tidak ada bahkan biasa dalam satu bulan sampai dua bulan itu tidak pernah ada sosialisasi”, (hasil wawancara pada tanggal 28 juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu anggota kelompok tani Bunga Mekar bahwa sosialisasi dilakukan secara tidak rutin dan tidak terjadwal yang kemudian jarak antara setiap sosialisasi biasanya sampai bulanan.

Disampaikan juga oleh SN selaku anggota kelompok tani Sabar Menanti saat di wawancarai oleh peneliti bahwa:

“saya bersama anggota di kelompok tani tidak tahu jelas bagaimana sebenarnya jadwal sosialisasi karena sosialisasinya tidak teratur dan tidak ada jadwal khusus”, (hasil wawancara pada tanggal 28 juni 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara dari anggota kelompok tani diatas bahwa masyarakat petani jaranga mendapatkan sosialisasi oleh pemerintah dan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah sendiri tidak teratur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari beberapa informan di atas mengenai sosialisasi bahwa sosialisasi yang di laksanakan di daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana sosialisasi hanya dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa ada jadwal yang teratur sehingga masyarakat sulit untuk berkembang dan hasil yang di dapatkan dari sosialisasi tersebut pun hanya sekedar kegiatan program pemerintah yang dijalankan kemasyarakat tanpa masyarakat petani pahami nilai dari kegiatan tersebut. Masalah atau kendala dari masyarakat juga tidak di atasi secara berkelanjutan di kegiatan sosialisasi pemerintah.

**Tabel 4.2 Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
Desa Lompoloang Kabupaten Wajo Tahun 2018**

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat	Sasaran	Ket
1.	11, Januari 2018	Sosialisasi Pengadaan pupuk Bersubsidi	Kantor Desa Lompoloang	Kelompok Tani	Terlaksana
2.	19, April 2018	Sosialisasi Pembuatan RBKK Pupuk Bersubsidi	Kantor Kecamatan Pitumpanua	Kelompok Tani	Terlaksana
3.	27, Juni 2018	Sosialisasi Pencegahan Penyakit Hama Kakao	Kantor Kecamatan Pitumpanua	Kelompok Tani	Terlaksana
4.	25, juli 2018	Sosialisasi Pengadaan Bibit Kakao	Kantor Desa Lompoloang	Kelompok Tani	Terlaksana
5.	7, Desember 2018	Sosialisasi Pengadaan Bantuan Alat Pertanian	Kantor Kecamatan Pitumpanua	Kelompok Tani	Terlaksana

Sumber: Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Lompoloang

Mengenai hasil wawancara dengan semua informan yang telah dipilih yang memberikan keterangan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat petani sangat jarang tersebut sesuai dengan yang di cantumkan dalam tabel diatas yang peneliti peroleh dari petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), bahwa dalam kurung waktu satu tahun masyarakat hanya mendapatkan lima kali kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah sementara itu, tidak semua masyarakat kelompok tani memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti kegiatan tersebut karna peserta sosialisasi yang dilakukan pemerintah terbatas, juga karena peserta yang mengikuti sosialisasi hanya kelompok yang mendapat panggilan dari pihak penyelenggara (pemerintah) hal inilah yang menjadi sebuah fakta akurat sehingga

peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa mengenai sub indikator sosialisasi hal ini dinyatakan masih kurang berhasil dalam proses pemberdayaan masyarakat kelompok tani.

2. Pendampingan

Pendampingan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan kelompok tani adalah suatu kegiatan yang menempatkan tenaga yang ahli di bidang pemberdayaan kelompok tani yang mampu berkomunikasi, mengarahkan dan memberi motivasi kepada masyarakat dalam upaya untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada masyarakat kelompok tani untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan MA selaku salah satu staf dinas pertanian bidang perkebunan Kabupaten Wajo bahwa:

“kami dari pihak Dinas Pertanian menugaskan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk mendampingi masyarakat di kelompok tani apabila masyarakat menemukan kendala yang berkaitan dengan perkebunan mereka”, (hasil wawancara pada tanggal 07 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu staf Dinas Pertanian bahwa mengenai pendampingan di masyarakat sudah ada PPL yang bertugas untuk mendampingi masyarakat apabila terjadi kendala dimasyarakat.

Sedangkan hasil wawancara dengan MY selaku Penyuluh Pertanian Lapangan mengungkapkan bahwa:

“mengenai pendampingan di masyarakat saya selaku PPL sangat kewalahan mendampingi masyarakat petani karena tugas saya selaku PPL bertugas di dua desa sehingga pendampingan yang saya lakukan sangat kurang”, (hasil wawancara pada tanggal 11 juni 2018).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat kurang mendapatkan pendampingan karena jumlah PPL hanya satu orang sementara membawahi dua desa. Lain halnya yang disampaikan oleh MS selaku ketua kelompok tani Bunga Mekar bahwa:

“saya dan anggota kelompok tani lain biasa menerima sosialisasi namun saya mengharapkan setelah di adakan sosialisasi tolong masyarakat kita dampingi agar materi yang di dapat pada sosialisasi dapat di jalankan di kebun bukan dibiarkan begitu saja”, (hasil wawancara pada tanggal 26 juni 2018)

Dari hasil wawancara ketua kelompok tani menyatakan bahwa pendampingan sangat di butuhkan di masyarakat petani apabila telah dilaksanakan sosialisasi namun yang terjadi tidak demikian yang mana setelah dilakukan sosialisasi tindak lanjut pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat sangat kurang bahkan tidak ada sehingga masyarakat menganggap bahwa sosialisasi hanya sekedar seminar untuk menyelesaikan program kerja pemerintah. Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh MT selaku ketua kelompok tani Sabar Menanti saat diwawancarai peneliti yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“saya bersama anggota kelompok saya itu berharap agar pendampingan kepada tiap kelompok tani itu rutin karena selama ini setelah pemerintah melaksanakan sosialisasi biasanya tidak adami lagi tindak lanjutnya pemerintah mendampingi atau mengingatkan tentang sosialisasi yang sudah di lakukan jadi masyarakat petani itu menerima materi tapi tidak tahu menjalankannya’, (hasil wawancara pada tanggal 26 juni 2018).

Dari hasil wawancara ketua kelompok tani diatas maka dinyatakan bahwa pendampingan sangat di butuhkan di masyarakat petani apabila telah dilaksanakan sosialisasi namun yang terjadi tidak demikian yang mana setelah dilakukan

sosialisasi tindak lanjut pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat sangat kurang serta hasil dari sosialisai yang tidak dilaksanakan dengan baik di lapangan karena kurang pemahannya masyarakat sehingga butuh pendampingan di lapangan ataupun pendampingan melalui media (*follow up*) pasca sosialisasi.

Hampir sama dengan yang di katakan oleh AA sebagai salah satu anggota kelompok tani Bunga Mekar bahwa:

“saya sebagai anggota selama bergabung di kelompok tani hampir 4 tahun tapi jarang sekali melihat pendamping kelompok tani turun ke lapangan, ituji biasa ada pendamping kalau tim pemeriksa dari kabupaten turun memeriksa”, (hasil wawancara pada tanggal 28 juni 2018).

Dari hasil wawancara anggota kelompok tani tersebut di atas mengatakan bahwa pendamping yang turun kelapangan hanya terlihat di waktu-waktu tertentu seperti apabila tim pemeriksa dari kabupaten turun kelapangan namun pada hari-hari biasanya pendamping kelompok tani jarang atau bahkan tidak pernah kelihatan sama sekali.

Disampaikan juga oleh SN selaku anggota kelompok Tani Sabar Menanti saat Ditemui dan diwawancarai peneliti yang menyatakan Bahwa:

“saya selama bergabung di klompok tani itu jarang sekali lihat atau rasakan adanya pendampingan dari pihak pemerintah atau PPL turun kelapangan biasa itu mereka datang kalau ada dari tim pusat yang turun meninjau ke daerah setelah itu hilangmi”, (hasil wawancara pada tanggal 28 juni 2018).

Dari hasil wawancara dari salah satu anggota kelompok tani diatas mengindikasikan bahwa pendampingan yang dilakukan pihak pemerintah kepada

masyarakat sangat minim sehingga anggota kelompok tani mengeluh dengan hal itu.

Tabel: 4.3 Jadwal Pendampingan Kelompok Tani Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo tahun 2018

No	Nama Kelompok Tani	Bulan/Tanggal						KET
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
1	Latappareng	3, 15	2, 14	1, 15	2, 13	3, 14	2, 14	
2	Bunga Mekar	4, 16	3, 15	2, 16	3, 14	4, 15	4, 15	
3	Tenrisau	5, 17	5, 16	3, 17	4, 16	5, 16	5, 16	
4	Sabar menanti	6, 18	6, 17	5, 19	5, 17	7, 17	6, 18	
5	Mattirodeceng	8, 19	7, 19	6, 20	6, 18	8, 18	7, 19	
6	Siporennu	9, 20	8, 20	7, 21	7, 19	9, 19	8, 20	
7	Massompu lolo	10, 22	9, 21	8, 22	9, 20	10, 21	9, 21	
8	Mattunru tunru	11, 23	10, 22	9, 23	10, 21	11, 22	11, 22	
9	Pada Idi	12, 24	11, 23	10, 24	11, 23	12, 23	12, 23	
10	Pada Elo	13, 25	12, 24	12, 26	12, 24	14, 24	13, 25	
11	Sipatuo	15, 26	13, 25	13, 27	13, 25	15, 25	14, 26	
12	Sipatokkong	16, 27	14, 26	14, 28	14, 26	16, 26	15, 27	
13	Makmur	17, 29	15, 27	15, 29	16, 27	17, 28	16, 28	
14	Sipakalebbi	18, 30	16, 28	16, 30	17, 28	18, 29	18, 29	
15	Lapance	19, 31	17, 25	17, 31	18, 30	19, 31	19, 30	

Sumber: Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Lompoloang

Keterangan:

Angka warna merah: Tidak terlaksana

Angka warna hitam : Terlaksana

Hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat di simpulkan bahwa pendampingan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang bahkan sangat jarang dilakukan, meskipun dari pihak Dinas Pertanian kabupaten telah memberikan tugas kepada pelaksana PPL untuk rutin kelapangan mendampingi masyarakat namun karena jumlah sumber daya manusia yang tersedia sangat terbatas untuk mendampingi masyarakat kelompok tani sehingga pendampingan yang dilakukan tidak massif, masalah faktor kurangnya tenaga pendamping menjadi hal yang menjadikan PPL untuk bermalas-malasan melakukan pendampingan karena melihat tugas dan tanggung jawab PPL begitu luas sementara sumber daya yang tersedia sangat terbatas.

Ditinjau dari tabel kehadiran PPL dalam mendampingi masyarakat Petani bahwa jadwal pendampingan setiap kelompok tani dalam sebulan tersebut sebanyak dua kali namun sesuai dengan tabel yang menunjukkan bahwa keterangan pada angka yang berwarna merah berarti tidak terlaksana sementara yang berwarna hitam terlaksana, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah hasil wawancara dari beberapa informan dan dikaitkan dengan tabel di atas maka pendampingan yang dilaksanakan kepada masyarakat petani masih minim atau kurang massif, dimana PPL hanya mampu melaksanakan pendampingan paling sering satu kali satu bulan bahkan tak jarang pendampingan tidak dilaksanakan selama satu bulan untuk satu kelompok tani, alasan terbut terjadi karena jumlah kelompok tani yang harus didampingi begitu banyak sementara PPL selaku pendamping hanya satu orang sehingga pada sub indicator pendampingan juga dikategorikan kurang berhasil dalam pemberdayaan masyarakat petani.

3. Pelatihan

Pelatihan merupakan serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat kelompok tani. Pelatihan pemberdayaan masyarakat juga merupakan instrumen yang secara efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan MA sebagai salah satu staf dinas pertanian bidang perkebunan Kabupaten Wajo bahwa:

“Pihak Dinas sendiri untuk masalah pelatihan kami berikan kepercayaan kepada PPL yang lebih mengetahui kondisi lapangan sehingga kami hanya menerima laporan mengenai apakah akan diadakan pelatihan atau tidak”, (hasil wawancara pada tanggal 07 juni 2018).

Dari pernyataan salah satu staf dinas terkait dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelatihan pemerintah kabupaten kurang aktif dalam memberikan pelatihan sehingga dia hanya melimpahkan kepada PPL.

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara dan observasi oleh MY selaku Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Desa Lompoloang bahwa:

“saya biasanya mengadakan pelatihan kepada masyarakat kurang lebih dua bulan sekali pesertanya dari beberapa kelompok tani (gapoktan) biasanya juga saya undang beberapa perwakilan kelompok tani untuk pelatihan di kabupaten”, (hasil wawancara pada tanggal 11 juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan yang ditemui dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan di masyarakat kelompok tani masih jauh dari harapan dilihat dari jumlah pelatihan yang di adakan oleh pemerintah yang sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan pengetahuan petani yang harusnya butuh banyak diadakan pelatihan. Berbeda dengan apa yang

disampaikan oleh AR selaku Kepala Desa Lompoloang saat di wawancarai bahwa:

“saya selaku pemerintah desa tidak tahu tentang kapan pelatihan, mau membahas apa, karena biasanya saya dapat surat saja kalau pelatihan mau di lakukan di kantor desa jadi surat yang masuk biasanya hanya surat untuk menggunakan aula kantor”, (hasil wawancara pada tanggal 22 juni 2018).

Dari hasil wawancara informan selaku Kepala Desa Lompoloang dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah desa setempat kurang berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani ditinjau dari pernyataan kepala desa hanya sekedar mengetahui apabila akan diakan pelatihan di Desa setempat. hal lain disampaikan oleh ketua kelompok tani Bunga Mekar yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh MS selaku ketua kelompok tani Sabar Menanti saat di wawancarai oleh peneliti yang menyatakan bahwa:

“saya sebagai ketua kelompok tani sangat jarang menerima undangan dari PPL atau dari kepala desa disini, kalau ada pelatihan dan biasanya juga kalau ada undangan pesertanya sedikit padahal teman-teman anggota kelompok tani banyak yang mau ikut”, (hasil wawancara pada tanggal 26 juni 2018).

Lebih lanjut berdasarkan dari hasil wawancara MS selaku ketua kelompok tani dapat di ketahui bahwa dari segi pelatihan perhatian pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan kondisi masyarakat petani masih kurang dilihat dari tingkat pelaksana pelatihan kepada masyarakat apalagi kesempatan masyarakat untuk mengikuti pelatihan agar dapat mengembangkan wawasannya dalam mengelola pertanian tidak semua memiliki kesempatan yang sama sehingga hal tersebut juga menjadi faktor pemicu perkembangan dan kemajuan masyarakat

petani terhambat. Kemudian hasil wawancara dari informan selanjutnya yaitu AA selaku salah satu anggota kelompok tani Bunga Mekar saat di wawancarai oleh peneliti menyatakan bahwa:

“kita disini satu desa banyak anggota kelompok tani tapi pemerintah tidak adil melakukan pelatihan karena biasa ada anggota kelompok tani yang di kasi ikut pelatihan berkali-kali padahal yang lain ada juga yang tidak pernah diikuti”, (hasil wawancara pada tanggal 28 juni 2018).

Hasil wawancara dari informan diatas memberikan keterangan bahwa pelatihan yang selenggarakan oleh pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat petani tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh SN salah satu anggota kelompok tani Sabar Menanti saat di peneliti melakukan observasi dan wawancara yang menyatakan bahwa:

“saya bersama anggota kelompok tani disini melihat ada timbul rasa iri ke kelompok tani yang lain karena pemerintah tidak adil melakukan pelatihan karena biasa ada anggota kelompok tani yang di kasi ikut pelatihan berkali-kali padahal yang lain ada juga yang tidak pernah diikuti”, (hasil wawancara pada tanggal 28 juni 2018).

Hasil wawancara dari informan diatas memberikan keterangan bahwa pelatihan yang selenggarakan oleh pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat petani tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak berjalan secara merata.

Sehingga berdasarkan keterangan dari beberapa informan yang bersangkutan terkait dengan aspek pelatihan dapat disimpulkan bahwa pada aspek pelatihan pemerintah masih kurang aktif dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat dilihat dari pernyataan oleh beberapa informan. Kurang aktifnya pemerintah dalam hal memberikan pelatihan kepada masyarakat karena

kurangnya sinergitas dan kerjasama antara pemerintah desa dengan kabupaten yang kemudian menjadikan pemerintah desa sendiri kurang dilibatkan dalam melakukan pelatihan kepada masyarakat petani di daerahnya sendiri, sehingga pada aspek ini pemerintah dikatakan tidak berhasil dalam melaksanakan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat petani.

Tabel 4.4 Pelaksanaan Pelatihan PPL Kepada Kelompok Tani Desa Lompoloang Kabupaten Wajo

No	Waktu pelaksanaan	Nama Kegiatan	Peserta	Tempat Pelatihan	KET
1	15 Februari 2018	Pelatihan teknik tempelan	Kelompok Tani	Kantor Desa Lompoloang	Terlaksana
2	09 April 2018	Pelatihan Sambung Pucuk	Kelompok Tani	Kantor Desa Lompoloang	Terlaksana
3	20 Juni 2018	Demonstrasi Tanaman Kakao	Kelompok Tani	Kantor Kecamatan Pitumpanua	Terlaksana
4	5, oktober 2018	Pemanfaatan Bantuan Sarana dan prasarana, Mesin Tangki, Alat Pemangkas dll	Kelompok Tani	Kantor Kecamatan Pitunpanua	Terlaksana

Sumber: Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Lompoloang

Pelaksanaan pelatihan yang disenggarakan oleh PPL sesuai dengan tabel yang terdapat di atas bahwa dalam kurung waktu kurang lebih satu tahun hanya 4 kali dilaksanakan pelatihan sehingga dengan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan petani tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga data dari tabel diatas sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh beberapa informan yang telah diwawancarai bahwa pelatihan

sangat jarang bahkan dalam satu bulan tidak menerima pelatihan, sementara dengan begitu banyaknya masalah yang ditemui oleh masyarakat dalam hal pertanian, sehingga mengindikasikan perlunya kegiatan pelatihan untuk mengatasi masalah-yang terjadi di masyarakat petani.

4. Kunjungan lapangan

Kunjungan lapangan merupakan kunjungan terencana dan terjadwal ke lokasi desa pemberdayaan. Dalam hal kunjungan lapangan yang bertujuan untuk mengamati masalah yang terjadi di lapangan serta menjadi ajang dalam pengawasan untuk terus mengawasi dan memperhatikan segala bentuk aktifitas masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut sehingga peneliti mewawancarai salah satu informan berinisial MA selaku staf dinas pertanian bidang perkebunan Kabupaten Wajo bahwa:

“Selaku pihak pemerintah kabupaten kami jarang melakukan kunjungan lapangan karena kami telah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada PPL untuk secara rutin terjun kelapangan untuk melihat dan mengamati hal-hal yang terjadi dimasyarakat memberikan pemahaman dan masukan jika terdapat masalah yang di temui di masyarakat petani”, (hasil wawancara pada tanggal 07 juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu staf dinas terkait dapat dijelaskan dengan adanya wewenang yang diberikan kepada PPL oleh pihak dinas maka pemerintah kabupaten itu sendiri kurang atau jarang melakukan kunjungan lapangan dengan alasan bahwa sudah dipercayakan kunjungan lapangan dilakukan secara rutin dan terjadwal oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Sementara itu keterangan yang didapatkan dari MY selaku PPL Desa Lompoloang yang mengemukakan bahwa:

“saya melakukan kunjungan lapangan lima kali dalam seminggu karena jam kerja saya hanya lima hari jadi dua harinya yaitu sabtu dan minggu saya gunakan untuk kerja laporan kantor jadi waktu libur saya gunakan untuk kerja laporan karena kondisi sumber daya yang membantu saya tidak ada”, (hasil wawancara pada tanggal 11 juni 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara oleh informan diatas maka dapat diketahui bahwa kunjungan lapangan ke masyarakat untuk tugas pemberdayaan secara teknis sudah teratur dengan baik namun yang menjadi kendala besar karena jumlah PPL yang turun kelapangan hanya satu orang sementara jumlah kelompok tani dalam dua desa yang PPL bawahi lebih dari dua puluh kelompok tani padi dan kakao. Berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh MS selaku ketua kelompok tani Bunga Mekar saat diwawancarai oleh peneliti yang memaparkankan:

“saya jarang melihat petugas PPL turun kelapangan melihat kondisi masyarakat petani paling dalam dua minggu sering sekalimi klo datang satu kali karena biasa di tunggu sama masyarakat kalau ada kendala yang mau di tanyakan sama pak MY tapi biasa di tunggu dua minggu lamanya tidak datang-datang” (hasil wawancara pada tanggal 26 juni 2018).

Berkaitan dengan informasi yang disampaikan informan diatas sedikit berbeda dengan yang di sampaikan oleh petugas PPL bahwa dari informan ketua kelompok tani sendiri memberikan keterangan jika kunjungan lapangan yang di lakukan oleh pemerintah sangat jarang bahkan rentang waktunya sampai berminggu-minggu sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa kunjungan lapangan yang di lakukan masih kurang sesuai dengan ketentuan jadwal oleh PPL.

Selanjutnya hampir sama keterangan dari salah AA selaku salah satu informan anggota kelompok tani Bunga Mekar menyatakan bahwa:

“jujur saya katakan kalau jarang sekali melihat pihak pemerintah atau PPL yang turun langsung kelapangan, dalam satu bulan itu bisa dihitung jari petugas yang turun kelapangan”, (hasil wawancara pada tanggal 28 juni 2018).

Berdasarkan dari keterangan yang di sampaikan informan setelah diwawancarai dapat kita ketahui bahwa pihak pemerintah baik dari pihak dinas pertanian maupun dari pihak PPL sangat jarang di temui oleh masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah masih kurang dalam melakukan kunjungan lapangan.

Selanjutnya hampir sama keterangan dari informan anggota kelompok tani Bunga Mekar juga disampaikan SN selaku anggota kelompok tani Sabar Menanti menyatakan bahwa:

“lebih baik bicara apa adanya kalau di daerah disini jarang sekali melihat ada petugas dari pemerintah turun langsung kelapangan, PPL juga jarang kelihatan”, (hasil wawancara pada tanggal 28 juni 2018).

Berdasarkan dari keterangan yang di sampaikan informan setelah diwawancarai dapat kita ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak pemerintah baik dari pihak dinas pertanian maupun dari pihak PPL sangat jarang atau kurang aktif turun kelapangan sehingga sulit ditemui oleh masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah masih kurang dalam melakukan kunjungan lapangan.

Berdasarkan dari beberapa keterangan informan diatas yang berkaitan dengan kunjungan lapangan maka dapat di pahami bahwa pada aspek ini

No	Nama Desa	minggu I Maret					Minggu ke II Maret					Minggu ke III Maret					Minggu ke IV Maret				
		1	2	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	21	22	23	26	27	28
1	Desa Lompoloang	-	H	-	H	-	-	H	-	-	H	-	H	H	-	H	-	-	H	-	H
2	Desa Mattirowalie	H	-	H	-	-	-	H	-	H	-	-	H	-	-	H	-	-	H	-	
3	Kel. Benteng	-	H	-	H	-	H	-	-	H	H	-	-	H	-	-	-	H	H	-	
JUMLAH																					

No	Nama Desa	minggu I April					Minggu ke II April					Minggu ke III April					Minggu ke IV April				
		1	2	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	21	22	23	26	27	28
1	Desa Lompoloang	H	-	-	H	-	-	-	H	-	-	-	H	H	-	-	-	H	-	-	H
2	Desa Mattirowalie	H	H	-	-	-	-	-	-	H	-	H	-	-	-	-	H	-	-	H	-
3	Kel. Benteng	-	H	-	H	-	H	-	-	-	H	-	-	H	-	H	-	H	-	-	-
JUMLAH																					

No	Nama Desa	minggu I Mei					Minggu ke II Mei					Minggu ke III Mei					Minggu ke IV Mei				
		1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28
1	Desa Lompoloang	-	-	-	H	-	-	H	-	H	-	-	H	-	-	-	H	H	-	-	-
2	Desa Mattirowalie	-	H	-	-	H	H	-	-	-	H	H	-	-	H	-	-	-	H	-	H
3	Kel. Benteng	-	-	H	-	-	-	H	H	-	-	-	-	H	-	H	-	-	-	H	-
JUMLAH																					

No	Nama Desa	minggu I Juni					Minggu ke II Juni					Minggu ke III Juni					Minggu ke IV Juni				
		1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28
1	Desa Lompoloang	H	-	H	-	-	-	H	-	H	-	-	H	-	-	-	H	-	-	-	-
2	Desa Mattirowalie	H	-	-	-	-	H	-	H	-	-	H	-	-	H	-	-	H	H	-	-
3	Kel. Benteng	-	H	-	-	H	-	H	-	-	H	-	H	-	-	H	-	H	-	-	H
JUMLAH																					

Sumber: Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Lompoloang

Berdasarkan dari keterangan data tabel yang terdapat diatas maka sub indikator kunjungan lapangan dapat dikatakan kurang berhasil karena dari hasil wawancara dengan informan serta dari data yang diperoleh dari PPL menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan pemerintah dalam kunjungan

lapangan terlihat jelas dari dari jadwal lima hari kerja dalam hal kunjungan lapangan namun faktanya tidak demikian karena yang terjadi bahwa dari jumlah jadwal kunjungan lapangan dalam satu minggu adalah lima hari namun tak jarang kunjungan lapangan yang mampu dilaksanakan PPL selaku pelaksana pemberdayaan rata-rata hanya 2 kali satu minggu bahkan ada hanya sekali seminggu hal inilah yang mengindikasikan bahwa pada sub indikator kunjungan lapangan ini dapat dikatakan kurang berhasil.

Selanjutnya berkaitan dengan indikator Dinamisator yang didalamnya terdapat subindikator (1) sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan dan (4) Kunjungan lapangan, menunjukkan bahwa dari subindikator yang disebutkan keseluruhan subindikator tersebut mengarah ke arah negatif dimana subindikator sosialisasi hanya dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa adanya jadwal yang teratur sehingga hal ini tentunya akan berdampak kurang baik. Begitu juga dengan subindikator pendampingan dan pelatihan dimana hal tersebut masih tergolong kurang bahkan sangat jarang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga juga mengakibatkan kurang aktifnya dalam pemberian pelatihan kepada masyarakat kelompok tani. Selanjutnya pada aspek terakhir yaitu pada aspek kunjungan lapangan, peneliti diperhadapkan pada kontradiksi argumen antara kedua pihak dalam program pemberdayaan ini dimana dari pihak pemerintah setempat berasumsi bahwa kunjungan langsung untuk meninjau lapangan telah terjadwal dan berlangsung secara rutin namun dari pihak masyarakat memberikan pernyataan sebaliknya, bahwa hal tersebut dirasakan masih kurang. Peneliti kemudian menganalisis dan menyimpulkan dengan mempertimbangkan hasil

observasi pada saat dilapangan bahwa memang dari segi kunjungan lapangan terkait dengan program pemberdayaan ini masih tergolong kurang dan belum optimal.

D. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitaas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang aman, nyaman dan terbit. Seperti menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia pada khususnya. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan.

1. Penyedia bibit unggul, pupuk dan sarana produksi lainnya

Pemerintah daerah dalam hal dinas pertanian memberikan fasilitas yaitu berupa bantuan kepada masyarakat petani seperti benih, pupuk dan sarana produksi lainnya di setiap anggota kelompok tani untuk di kelola dan di dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai MA selaku staf Dinas Pertanian yang mangatakan bahwa:

“biasanya bantuan kami berikan kemasyarakat berupa bibit, pupuk, dan alat pertanian lainnya melalui anggaran APBD dari Kabupaten”, (hasil wawancara pada tanggal 07 juni 2018).

Berdasarkan keterangan dari informan di atas maka dapat diketahui bahwa terkait penyaluran bibit, pupuk dan bantuan sarana produksi lainnya di berikan kepada masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah dilaksanakan. Tidak jauh berbeda dengan apa yang di sampaikan MY selaku PPL Desa Lompoloang saat di wawancarai yang menyatakan bahwa:

“kami dari pihak PPL sudah sering memberikan banyak bantuan kepada masyarakat petani seperti bibit, pupuk dan alat pertanian lainnya namun bantuan yang di berikan biasanya tidak di manfaatkan dengan baik, banyak yang sekedar mengambil bibit atau pupuk tapi tidak di gunakan bahkan hanya disimpan di rumah sendiri”, (hasil wawancara pada tanggal 11 juni 2018).

Hasil wawancara dari salah satu informan yang di temui oleh peneliti dapat di simpulkan bahwa bantuan yang diberikan kemasyarakat berjalan dengan efektif hanya saja bantuan yang di salurkan pemerintah tidak jarang di abaikan atau tidak dimanfaatkan dengan semestinya oleh masyarakat petani. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan lain yaitu AR selaku Kepala Desa Lompoloang terkait dengan penyediaan bibit, pupuk dan sarana produksi dari pemerintah Menyatakan bahwa:

“saya sebagai kepala desa tidak banyak tau kalau ada bantuan dari pemerintah kepada masyarakat petani karena kalau ada bantuan biasanya dari pihak kabupaten atau dinas langsung ke kelompok tani tidak melalu pemerintah desa lagi, kecuali bantuannya dari dana aspirasi barulah melalui pemerintah desa”, (hasil wawancara pada tanggal 22 juni 2018).

Berdasarkan keterangan dari pihak Kepala Desa dapat di simpulkan bahwa terkait bantuan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah atau pusat pihak pemerintah desa kurang mengetahui karena apabila terdapat bantuan yang di

berikan kemasyarakatan sudah tidak melalui perintah desa lagi tetapi langsung dari pihak pemerintah kabupaten ke kelompok tani Bunga Mekar. Berdasarkan dari keterangan MS selaku ketua kelompok tani saat diwawancarai oleh peneliti yang menyatakan bahwa:

“saya sebagai ketua kelompok tani itu memang sudah sering mendapat bantuan pupuk, bibit, alat semprot dan alat pertanian lainnya jadi bantuan itu di bagi ke semua anggota kelompok tani tapi biasa ada anggota disini yang mengambil bantuan yang diberikan tapi tidak na pakai di kebunnya seperti bantuan pupuk sama bantuan bibit biasa di simpan saja di rumahnya sampai rusak dan tidak bisami lagi di pakai”, (hasil wawancara pada tanggal 26 juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti saat mewawancarai salah satu ketua kelompok tani dapat dipahami bahwa pada aspek ini pemerintah sebagai fasilitator sudah bekerja dengan baik dilihat dari bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat petani yang sudah lebih memadai serta merata namun bantuan yang diberikan kadang tidak di indahkan serta tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Sementara itu keterangan yang hampir sama juga di paparkan oleh MT selaku ketua kelompok tani Sabar Menanti saat diwawancarai oleh peneliti yang menyampaikan bahwa:

“saya sebagai ketua kelompok tani disini beberapa kali mendapat bantuan pupuk, bibit, alat semprot atau alat petani batu dibagi ke yang lain tapi biasa ada anggota disini yang mengambil bantuan yang diberikan tapi tidak na pakai di kebunnya seperti bantuan pupuk sama bantuan bibit biasa di simpanji saja di rumahnya sampai rusak dan tidak bisami lagi di pakai”, (hasil wawancara pada tanggal 26 juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti saat mewawancarai salah satu ketua kelompok tani dapat jelaskan bahwa pada aspek ini pemerintah

sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat petani melalui bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat namun bantuan yang diberikan kadang tidak diindahkan serta tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Lain halnya yang disampaikan oleh AA sebagai salah satu anggota kelompok tani Bunga Mekar saat diwawancarai oleh peneliti yang menyatakan bahwa:

“saya biasa menerima bantuan pupuk dan bibit biasa juga alat pertanian tapi pupuk yang di berikan biasa saya simpan di rumah karena tidak tahu cara pakainya jadi kusimpan saja di rumah, bibit juga biasa saya simpan di rumah kadang tidak di tanam sampai mati sendiri karena bibitnya kurang subur dan kalo di tanam hanya buang-buang tenaga karena susah tumbuh makanya di simpan dirumah saja”, (hasil wawancara pada tanggal 28 juni 2018).

Berdasarkan pernyataan yang di dapatkan peneliti saat mewawancarai salah satu informan dapat diketahui bahwa bantuan pemerintah sudah bisa dikatakan cukup baik dan sampai kemasyarakat namun beberapa bantuan pemerintah yang di berikan kepada masyarkat tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat petani bahkan ada beberapa yang dibiarkan begitu saja oleh masyarakat tanpa di pergunakan dengan baik.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan sebelumnya juga disampaikan oleh SN selaku anggota kelompok tani Sabar Menanti saat diwawancarai oleh peneliti ia mengemukakan bahwa:

“saya dan anggota lain merima bantuan pupuk dan bibit biasa juga alat pertanian tapi pupuk yang di berikan biasa saya simpan di rumah karena tidak tahu cara pakainya bagaimana takarannya serta gunannya untuk apa jadi kusimpan saja di rumah, bibit juga biasa saya simpan di rumah kadang tidak di tanam sampai mati sendiri karena bibitnya kurang subur dan kalo di tanam hanya buang-buang tenaga karena bibitnya banyak yang sudah

rusak jadi kalau kami tanam biasa hanya stengahnya saja yang tumbuh sehingga kami harus kerja dua kali untuk tutupi yang mati”, (hasil wawancara pada tanggal 28 juni 2018).

Berdasarkan pernyataan yang di dapatkan peneliti saat mewawancarai salah satu informan dapat diketahui bahwa bantuan pemerintah sudah bisa dikatakan cukup baik dan sampai kemasyarakat namun beberapa bantuan pemerintah yang di berikan kepada masyarkat tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat petani bahkan ada beberapa yang dibiarkan begitu saja oleh masyarakat tanpa di pergunakan dengan baik, selain daripada hal tersebut juga alasan masyarakat tidak menggunakan dengan bantuan yang diberikan karena ketidak sesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat seperti masala bibit yang berpenyakit atau bibit sudah rusak sehingga jika itu di tanam oleh masyarakat sama hal membuang-buang tenaga karena hasilnya hanya bisa sampai setengahnya saja dari keseluruhan bibit yang ditanam. Berikut tabel bantuan sarana dan prasarana yang di berikan pemerintah kepada masyarakat.

Tabel 4.6 Bantuan Sarana dan Prasarana Anggota Kelompok Tani Desa Lompoloang Tahun 2018

No	Jenis Bantuan	Sasaran	Jumlah/Unit	Keterangan
1	Bantuan Bibit Kakao	Anggota Kelompok Tani	Sesuai Kebutuhan Kelompok Tani	Terealisasi
2	Bantuan Pupuk Bersubsidi	Kelompok Tani	1 ton/Kelompok Tani	Terealisasi
3	Bantuan Alat Semprot (Tangki)	Kelompok tani	5 Unit/Kelompok Tani	Terealisasi
4	Bantuan Pisau alat sambung Pucuk	Kelompok Tani	10 unit/ Kelompok Tani	Terealisasi

Sumber: Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Lompoloang

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari petugas Penyuluh Pertanian Lapangan bahwa terkait dengan sub indikator fasilitator pemerintah telah mampu memberikan peran sebagai fasilitator kepada masyarakat dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, bantuan seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian lainnya sampai kepada masyarakat hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan anggota kelompok tani yang menyampaikan bahwa bantuan yang berikan pemerintah tersebut sampai kepada masyarakat petani meskipun ada beberapa kendala yang terdapat di masyarakat terkait dengan bantuan tersebut.

Lebih lanjut Berdasarkan dari beberapa keterangan informan yang telah di wawancarai oleh peneliti berkaitan dengan aspek penyediaan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya (fasilitator) maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah selaku penyedia layanan bagi masyarakat sudah mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik, dengan demikian masyarakat sudah merasakan berbagai bentuk bantuan pemerintah yang diberikan tersebut juga secara keseluruhan sampai kepada masyarakat petani, meskipun ada beberapa bantuan yang secara kualitas belum bisa di katakan baik karena ada beberapa bantuan seperti bibit yang tak jarang kurang subur sampai kemasyarakat karena proses penyaluran pemerintah yang jauh dari pusat ke daerah menjadi salah satu faktor sehingga bibit yang sampai ke masyarakat kurang subur lagi sementara pada saat belum disalurkan ke masyarakat petani bibit-bibit itu masih normal dan subur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

- 1) Pada aspek Regulator khususnya mengenai aturan/ mekanisme serta kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan kelompok tani masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang aturan yang mengikat masyarakat untuk diberdayakan, sehingga masyarakat ikut dengan program pemberdayaan hanya sekedar ikut tanpa ada pembekalan pengetahuan mengenai aturan dan kebijakan pemerintah, sementara dari pihak pemerintah kecamatan sendiripun saat diwawancarai oleh peneliti tidak mampu menjelaskan tentang aturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku dalam proses pemberdayaan masyarakat petani karena faktanya dari hasil wawancara dan observasi peneliti pemerintah kecamatan sendiri kurang memahami hal tersebut hal tidak adanya kegiatan sosialisai dan kegiatan lainnya dari pemerintah pusat maupun kabupaten terkait dengan hal tersebut, namun disisi lain semua aturan pemerintah tentang pemberdayaan petani telah di atur dari pusat hingga diatur di daerah kabupaen masing-masing sehingga pada aspek ini dianggap bahwa pemerintah telah mampu

menyediakan aturan sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan kelompok tani.

- 2) Pada aspek dinamisor yang kemudian didalamnya terdapat subindikator (1) sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan dan (4) Kunjungan lapangan, menunjukkan bahwa dari subindikator yang disebutkan, keseluruhan subindikator tersebut mengarah ke arah negative yang artinya bahwa dari keterangan yang telah diperoleh peneliti saat menemui informan mengindikasikan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sangat jarang dilaksanakan oleh pelaksana pemberdayaan dimana sosialisasi hanya dilaksanakan selama lima kali dalam satu tahun sementara pendampingan kepada kelompok tani yang dilakukan pemerintah dengan jadwal dua kali satu bulan namun yang mampu dilaksanakan hanya satu kali satu bulan bahkan tidak jarang terjadi pendampingan tidak dilaksanakan dalam satu bulan, sementara pada subindikator pelatihan serta kunjungan lapangan hampir sama dengan dua sub indikator sebelumnya bahwa pelatihan yang dilakukan pemerintah sangat jarang dilaksanakan sementara masyarakat sangat minim pengetahuan dalam mengelola pertanian demi meningkatkan dan kemajuan masyarakat petani, begitupula dengan kunjungan lapangan bahwa dengan jumlah kelompok tani yang terbilang banyak sementara Penyuluh Pertanian Lapangan hanya satu orang sehingga dengan jumlah sumber daya PPL yang begitu terbatas kunjungan lapangan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

3) Pada aspek Fasilitator ketersediaan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya bahwa pemerintah selaku penyedia layanan bagi masyarakat sudah mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik, dengan demikian masyarakat sudah merasakan berbagai bentuk bantuan pemerintah yang diberikan tersebut juga secara keseluruhan sampai kepada masyarakat petani, meskipun ada beberapa bantuan yang secara kualitas belum bisa dikatakan baik karena ada beberapa bantuan seperti bibit yang tak jarang kurang subur sampai kemasyarakat karena proses penyaluran pemerintah yang jauh dari pusat ke daerah menjadi salah satu faktor sehingga bibit yang sampai ke masyarakat kurang subur lagi sementara pada saat belum disalurkan ke masyarakat petani bibit-bibit itu masih normal dan subur.

2. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dan stakeholder terkait untuk lebih meningkatkan atensinya terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di desa lompoloang kecamatan pitumpanua kabupaten wajo.
2. Seharusnya pemerintah sebagai regulator mampu menjadi penyedia yang memberikan arah yang baik bagi masyarakat melalui regulasi yang memihak kepada masyarakat untuk perkembangan dan kemajuan masyarakat petani.
3. Sepantasnya pemerintah sebagai dinamisator mampu memberikan arahan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang mampu menumbuhkembangkan kondisi kehidupan masyarakat serta mengajak masyarakat ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat pertanian.

4. Pemerintah harus lebih rutin dalam mendampingi dan memberikan pelatihan dan pendampingan sehingga masyarakat petani lebih paham dalam meningkatkan kualitas produksi para petani.
5. Seharusnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat petani (petugas) penyuluh pertanian lapangan harus dibekali lebih baik sehingga untuk terjun kelapangan lebih paham dengan kondisi kebutuhan masyarakat petani.
6. Seharusnya pelaksana Penyuluh Pertanian Lapangan Harus di tambah setiap Desa melihat begitu banyaknya jumlah kelompok tani yang ingin diberdayakan namun tidak sesuai dengan jumlah petugas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat petani.
7. Perbaikan infrastruktur di Desa Lompoloang juga harus lebih di perbaiki karena pemberdayaan susah di laksanakan oleh pemerintah apabila akses jalan susah di lewati untuk sampai ke lokasi pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Nur. 2014. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan masyarakat Petani di Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng*. Unismuh Makassar.
- Alfitri. 2011. *Community Development (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alam. Syamsul. 2012. *Prencanaan Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Kebudayaan Tanah Adat Karangpuang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai*. Unismuh Makassar.
- Bahtiar, A. M. 2011. Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pengembangan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara. Unismuh Makassar.
- Davey, K.J, 2008, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek International dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta.
- Dyah Respati, dan Hastuti. 2009. *Model Pemberdayaan. Negeri* : Yogyakarta
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moleong, J. L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pamudji, S. S. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pitana, I. Gede. 2006 . *Desa Wisata dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kerakyatan*. dalam I. G. Pitana, *Kepariwisata Bali dalam Wacana Otonomi Daerah* (Hal. 132-144). Jakarta: Pusblisbang Kepariwisataan, Depbudpar.
- Pitana, I. Gede. Dan Gayatri. P.G. 2015. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi. Yogyakarta

- Siagian, S.P. 2009. *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra., 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Suriadi, Agus., 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, Medan: Departemen Ilmu Kesejahteraan Ilmu Sosial Fisip USU.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
- Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Fisip Univesitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2014.

L
A
M
P
I
R
A
N

MATRIX PEDOMAN OBSERVASI

Fokus	Indikator	Pertanyaan	
1. Regulator	1. Aturan-aturan tentang pemberdayaan kelompok tani.	1) Aturan apakah yang dikeluarkan pemerintah daerah mengenai pemberdayaan petani?	
		2) Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai aturan dasar pemberdayaan kelompok tani?	
	2. Kebijakan pemerintah.	1) Apakah Kebijakan pemerintah mendukung perkembangan masyarakat dalam hal pemberdayaan?	
		2) Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung masyarakat dalam pemberdayaan kelompok tani?	
2. Dinamisator	1. Sosialisasi	1) Seperti apa pelaksanaan sosialisasi mengenai masalah yang dihadapi masyarakat petani?	
		2) Berapa kali sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam satu bulan/tahun?	
	2. Pendampingan	1) Bagaimana cara pendampingan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat mengenai pemberdayaan kelompok tani?	
		2) Apakah pendampingan yang dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat efektif dalam mengembangkan masyarakat petani?	
			1) Bagaimana Model pelatihan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat petani?
			2) Apakah pelatihan yang di berikan kepada

	3. Pelatihan	masyarakat efektif untuk mengembangkan masyarakat?
	4. Kunjungan Lapangan.	1) Apakah petugas PPL rutin melakukan kunjungan lapangan setiap bulannya kemasyarakat?
		2) Berapa jumlah petugas PPL yang turun kelapangan setiap kunjungan ke masyarakat?
3. Fasilitator	1. Penyedia bibit unggul	1) Pemerintah menyediakan bibit secara gratis atau berbayar?
		2) Dalam waktu berapa lama biasanya bibit di sampai kepada masyarakat?
	2. Penyedia pupuk	1) Apakah pupuk yang tersedia cukup untuk kebutuhan petani?
		2) Bagaimana cara pembagian pupuk untuk petani dari pemerintah dan apakah secara merata atau tidak?
	3. Sarana dan prasarana produksi	1) Sarana dan prasana seperti apa yang di berikan pemerintah kepada masyarakat petani?
		2) Apakah sarana dan prasana yang di berikan pemerintah berdampak baik bagi masyarakat?

MATRIX PEDOMAN WAWANCARA

Fokus penelitian	Indikator	Kondisi/Keadaan	Ya/Tidak	Keterangan
1. Regulator.	a) Aturan-aturan tentang pemberdayaan kelompok tani.	Aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah mengenai pemberdayaan petani		
		Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai aturan dasar pemberdayaan kelompok tani		
	b) Kebijakan pemerintah.	Kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan masyarakat		
		Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung masyarakat dalam pemberdayaan kelompok tani.		
2. Dinamisator	a. Sosialisasi	Pelaksanaan sosialisasi mengenai masalah yang dihadapi masyarakat petani		
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam satu bulan/tahun		
	b. Pendampingan	Pendampingan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat		
		pendampingan yang dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat efektif dalam mengembangkan masyarakat petani		
	c. Pelatihan	Model pelatihan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat		
		Tingkat keefektifan pelatihan yang diberikan		

		kepada masyarakat		
	d. Kunjungan lapangan	Jumlah kunjungan lapangan petugas PPL setiap bulannya		
		jumlah petugas PPL yang turun kelapangan setiap kunjungan ke masyarakat		
3.Fasilitator	a. Penyedia bibit unggul	Tersedianya bibit unggul dari pemerintah		
		Rentang waktu yang dibutuhkan sehingga bibit sampai kepada masyarakat		
	b. Penyedia pupuk	Ketersediaan pupuk bagi petani		
		tingkat Kebutuhan pupuk masyarakat petani		
	c. Sarana dan prasarana produksi	kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang diberikan oleh pemerintah		
		Sarana dan prasana yang di salurkan pemerintah berdampak baik bagi masyarakat		

Matriks Perbaikan Ujian Hasil

No	Nama Penguji	Saran/perbaikan	Hal	Hasil Perbaikan	Hal
1	Dr. Jaelan Usman, M. Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki abstrak lebih singkat dan padat 2. Perbaiki Hasil dan pembahasan disesuaikan dengan teori pada Bab II 3. Perbaiki semua saran dan solusi dari pembimbing 4. Perbaiki simpulan dan saran 	<p>abstrak</p> <p>Bab II - Bab V</p> <p>Bab I – Bab V</p> <p>Bab V</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abstrak lebih dipersingkat dan padat 2. Pembahasan disesuaikan dengan teori 3. Merubah penulisan Miring yang bukan kalimat Asing dan menulis miring kalimat asing 4. Memperbaiki Kesimpulan dan saran 	<p>Abstrak</p> <p>Abstrak</p> <p>Bab I-Bab V</p> <p>Bab V</p>
2	Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penulisan dibenahi kembali 2. Table informan penelitian dilengkapi -Nama informan -Inisial nama informan 3. Hasil wawancara dilengkapi dengan inisial, tanggal, bulan, tahun 4. Perbaiki kutipan yang tidak tercantum dalam daftar pustaka 5. Daftar pustaka ditambah 	<p>Bab I – Bab V</p> <p>Bab III</p> <p>Bab V</p> <p>Bab II</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membenahi Jenis Penulisan 2. Memperbaiki tabel informan -Nama informan -Inisial nama informan 3. Melengkapi inisial nama, Tanggal Bulan dan Tahun 4. Melengkapi Kutipan yang tercantum di bab II namun tidak tercantum di daftar pustaka 5. Menambah daftar pustaka 	<p>Bab I - Bab V</p> <p>Bab III- Bab IV</p> <p>Bab IV</p> <p>Bab II</p> <p>Daftar Pustaka</p>
3	Drs. Ruskin Azikin, MM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukkan Aturan Terbaru dari Menteri pertanian 2. Masukkan peraturan daerah kabupaten 	<p>Bab I- Bab II</p> <p>Bab I – Bab II</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganti aturan terbaru menteri pertanian 2. Memasukkan peraturan daerah kabupaten 	<p>Bab I- Bab II</p> <p>Bab I- Bab</p>

		wajo 3. Buat kan table data perbandingan pada hasil indikator	Bab IV	wajo. 3. Membuat tabel data Hasil indikator	II Bab IV
4	Haerana S.Sos, M.Pd	1. Perbarui peraturan pemerintah yang dikutip 2. Perbaiki hasil analisis penelitian untuk menjawab rumusan masalah 3. Tabel di skripsi diperbaiki	Bab I Bab II – Bab IV Bab II- Bab IV	1. Peraturan Mentri Pertanian dan peraturan Daerah Kabupaten Wajo telah diperbarui. 2. Perbaiki hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah 3. Perbaiki Tabel yang terdapat di dalam skripsi	Bab I- Bab V Bab I- Bab IV Bab I- Bab V

1. Wawancara dengan staff Dinas Pertanian



2. Wawancara Dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pitumpanua



3. Wawancara Dengan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Lompolang



4. Wawancara Dengan Kepala Desa Lompoloang



5. Wawancara Dengan Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani



6. Wawancara Dengan Anggota Kelompok Tani Desa Lompolang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kasming, dilahirkan di Bone pada hari Kamis tanggal 04 bulan April tahun 1996. Anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Aliming dan Hj. Nurlela memiliki satu adik perempuan bernama Kasmiati. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 189 Lompoloang dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 04 Pitumpanua lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya di SMAN 02 Bantaeng dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti juga aktif dalam dunia organisasi kepanduan dan organisasi intra kampus dengan terlibat secara aktif di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 02 Bantaeng Serta Pecak Silat Prisai Putih Di SMAN 02 Bantaeng. Peneliti juga merupakan Pengurus dari Berbagai Organisasi Internal Kampus yaitu Sebagai Sekretaris Bidang SPM di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2016-2017, Ketua Bidang Keilmuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fisipol Tahun 2016-2017, Ketua Bidang Kader Badan Eksekutif Mahasiswa Fisipol Tahun 2017-2018, Serta aktif di organisasi eksternal kampus selaku Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI PT Unismuh) pada tahun 2016-2018.

Dengan ketekunan kerja keras hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”.